

SITUASI YURISDIKSI BERKELANJUTAN: SINTESIS UNTUK PARA PRAKTISI DAN PEMBUAT KEBIJAKAN



Earth
Innovation
Institute



GCF
task force

Penulis | Claudia Stickler¹, Amy Duchelle², Juan Pablo Ardila¹, Daniel Nepstad¹, Olivia David¹, Charlotta Chan¹, Juan Gabriel Rojas¹, Rafael Vargas¹, Tathiana Bezerra¹, Luke Pritchard³, Julie Simmonds³, Joanna Durbin⁴, Gabriela Simonet², Swetha Peteru², Mella Komalasari², Maria DiGiano¹, Matt Warren¹

Kontak | cstickler@earthinnovation.org

DIDUKUNG OLEH:



based on a decision of the German Bundestag



¹ Earth Innovation Institute, San Francisco, CA

² Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia

³ Sekretariat Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan, Universitas Colorado-Laboratorium untuk Inovasi Kebijakan Energi dan Lingkungan Hidup

⁴ Climate, Community & Biodiversity Alliance, Washington, D.C., AS

PESAN PENTING

- Studi mengenai 39 yurisdiksi subnasional di 12 negara mencakup 28% hutan tropis di dunia dan sangat beragam baik dalam laju deforestasi maupun jumlah hutan yang tersisa.
- Hampir seluruhnya (38 dari 39) telah menandatangani komitmen resmi berskala internasional untuk memperlambat deforestasi dan/atau mempercepat reforestasi atau pemulihan hutan.
- Banyak yang membiayai dan menerapkan kebijakan dan program yang inovatif, memprioritaskan masyarakat adat, komunitas lokal, petani penggarap sebagai penerima manfaat dari intervensi ini.
- Deforestasi dari yurisdiksi telah menurun hingga separuhnya (19 dari 39), di bawah perkiraan angka resmi dari tingkat referensi hutan.
- Penurunan angka deforestasi ini sekitar 6,8 GtCO₂e dari karbon emisi terhindarkan,¹ diperoleh baik dari intervensi kebijakan subnasional dan nasional maupun aksi pihak swasta.

PENDAHULUAN

Hutan tropis merupakan sumber utama penghidupan, air dan bahan bakar bagi lebih dari 1 miliar orang yang tinggal di wilayah tropis.² Mereka memainkan peran penting dalam siklus hidrologi global, termasuk mendinginkan atmosfer. Deforestasi, degradasi hutan dan emisi lahan gambut kini menjadi sumber dari sekitar 15% emisi GRK global di atmosfer.³ Dalam keadaan yang kritis ini, untuk mengurangi emisi global, penyerapan karbon oleh hutan tropis dalam proporsi yang signifikan offset karbon bahan bakar fosil yang diperkirakan akan dilepaskan antara saat ini hingga 2050.⁴ Dengan menstabilkan dan mengurangi konsentrasi CO₂ di atmosfer dalam jangka pendek, mengurangi emisi dari hutan tropis dengan menjembatani dunia yang bebas bahan bakar fosil, yang sepertinya membutuhkan waktu lama untuk mencapainya.

Beberapa negara terkaya di dunia telah memprioritaskan untuk membantu menghentikan deforestasi dan perubahan tutupan/penggunaan lahan beremisi tinggi lainnya untuk daerah Tropis. Secara kolektif, Norwegia, Jerman dan Britania Raya telah berkontribusi sebesar AS\$2,9M sejak tahun 2008 untuk memperlambat deforestasi tropis dan degradasi dalam area studi yurisdiksi kami. Donor multilateral lainnya juga telah berkomitmen sejumlah AS\$1,4M (*lihat Bagian 4*). Sebuah pertanyaan penting bagi para penyandang dana ini, sebagaimana mereka para penghuni daerah-daerah lain dan masyarakat luas adalah apakah usaha mereka telah berkontribusi terhadap penurunan emisi di hutan tropis dan peningkatan kesejahteraan di wilayah tersebut.

Pendekatan yurisdiksi bagi pembangunan rendah emisi yang berkelanjutan dapat berpotensi luar biasa untuk memacu solusi holistik jangka panjang bagi permasalahan rumit dari deforestasi hutan tropis, pertanian dan ketahanan

pangan.⁵ Dengan banyaknya “eksperimen” yurisdiksi yang tengah berjalan di seluruh penjuru dunia, waktunya telah tiba untuk pengkajian sistematis. Laporan ini menyediakan sintesis menyeluruh dari keberlanjutan yurisdiksi lintas daerah Tropis berdasarkan penelitian di 39 yurisdiksi subnasional dimana ada keinginan untuk mengimplementasikan agenda pembangunan rendah emisi (Gbr. 1).

Lebih khususnya lagi, kami mengevaluasi perkembangan dalam elemen-elemen inti keberlanjutan yurisdiksi termasuk kebijakan dan insentif yang inovatif, target performa yang jelas, sistem pemantauan yang transparan dan aksesibel, platform tata kelola multi pemangku kepentingan yang inklusif, inisiatif pertanian yang berkelanjutan, serta pengakuan dan penghormatan bagi hak-hak lokal, dan lebih banyak lagi. Evaluasi ini juga mencakup analisis mendalam tentang deforestasi dan emisi (termasuk pemicu dan agen-agen deforestasi dan degradasi hutan) dan menguji implikasi potensial untuk strategi pembangunan daerah pedesaan rendah emisi (LED-R) bagi pengurangan emisi di masa mendatang. Dan juga mengeksplorasi hambatan dan peluang untuk mendorong keberlanjutan yurisdiksi. Kami menguji beberapa pertanyaan ini:

- 1. Apakah angka deforestasi telah berkurang dalam studi?**
- 2. Komitmen macam apa yang telah dilakukan yurisdiksi untuk mengurangi deforestasi dan/atau emisi, dan target sosio-ekonomi dan lingkungan lainnya?**
- 3. Perkembangan seperti apa yang telah dilakukan yurisdiksi dalam memajukan LED-R?**
- 4. Bantuan dan/atau pengakuan dari luar seperti apa yang telah diterima yurisdiksi?**
- 5. Bagaimana agar yurisdiksi dapat mendukung LED-R untuk terus maju?**

1 Kalkulasi ini untuk penghitungan kasar dari emisi karbon terhindarkan, hanya mempertimbangkan offset. Emisi terhindarkan bersih – pengurangan emisi dikurangi penambahan emisi – sama dengan 6,39 Mt CO₂.

2 Seymour, F. dan J. Busch. 2016. *Why Forests? Why Now?* The Science, Economics, and Politics of Tropical Forests and Climate Change. Center for Global Development.

3 Van der Werf, dkk. 2009. “CO₂ emissions from forest loss.” *Nature Geoscience*.

4 Griscom, B.W. dkk. 2017. “Natural climate solutions.” *PNAS* 114(44): 11645-11650.

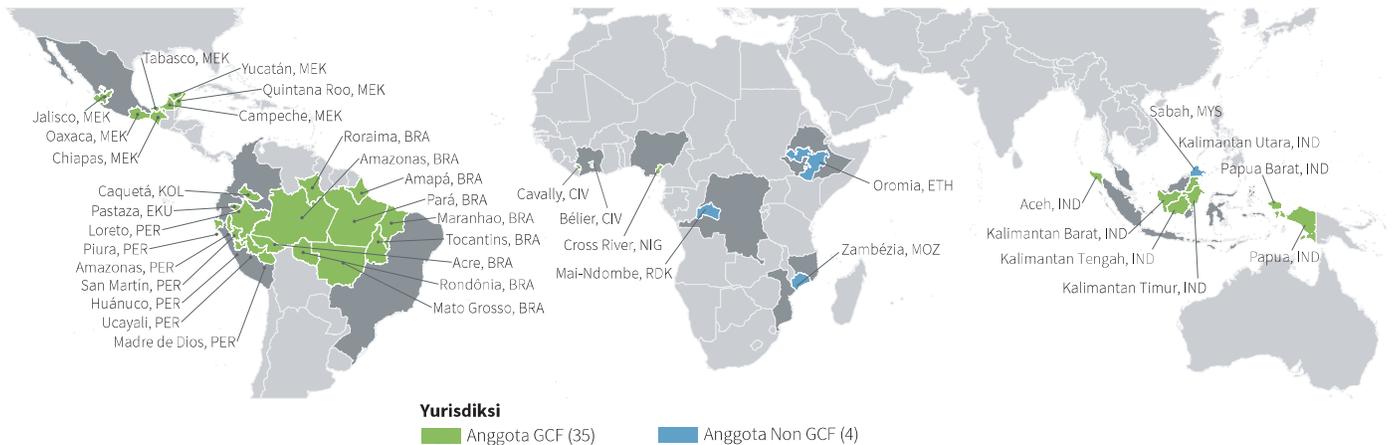
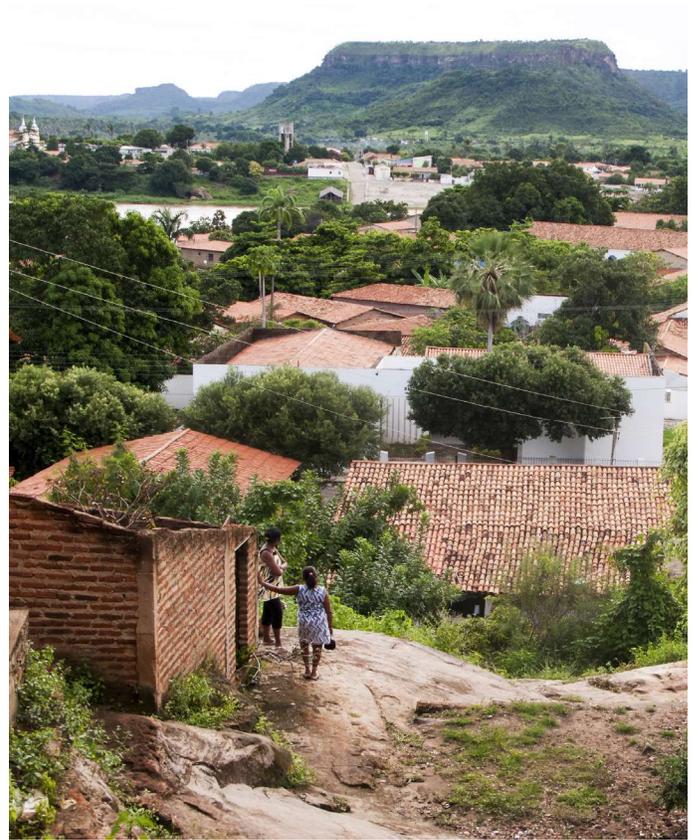
5 D. Nepstad, dkk. 2013. “More Food, More Forest, Few Emissions, Better Livelihoods: Linking REDD+, Sustainable Supply Chains and Domestic Policy in Brazil, Indonesia and Colombia.” *Carbon Management* 4 (6): 639–58; W. Boyd, et al. 2018. “Jurisdictional Approaches to REDD+ and Low Emissions Development: Progress and Prospects.” Makalah. Washington, DC: World Resources Institute. Tersedia online di wri.org/ending-tropicaldeforestation.

KOTAK 1. KONSEP UTAMA

Keberlanjutan yurisdiksi: transisi sukses menuju pembangunan berkelanjutan – meliputi dimensi sosial, lingkungan dan ekonomi – melintasi ranah geografis politik seperti negara bagian, provinsi, daerah, distrik atau bangsa. Sukses diukur dari “tembok ke tembok”, melintasi seluruh yurisdiksi dan juga meliputi seluruh jangkauan aktivitas, sistem produksi, ekosistem dan para pelaku.

Pendekatan yurisdiksi: sebuah tipe manajemen lanskap yang terintegrasi, dengan fitur penting yang khas: lanskap yang diatur oleh batasan-batasan yang sejalan dengan kebijakan, dan strategi yang dibuat untuk meraih keterlibatan pemerintah tingkat tinggi.

Pembangunan daerah pedesaan rendah emisi (LED-R): sebuah pendekatan yurisdiksi menuju keberlanjutan, dimana kestabilan iklim menjadi tujuan utama dengan memfokuskan pada populasi pedesaan, serta baik itu kepedulian lingkungan maupun pembangunan terintegrasi dalam skala yurisdiksi keseluruhan.



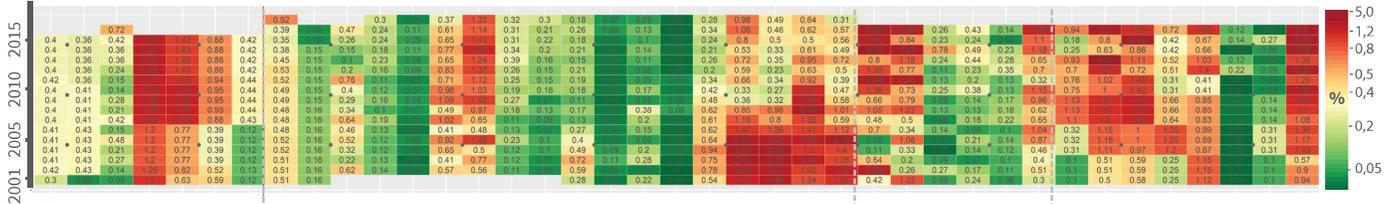
Gambar 1: Studi ini memfokuskan utamanya pada 39⁶ divisi administratif dan politik subnasional tingkat pertama (contoh: provinsi, negara bagian) di 12 negara tropis yang mengembangkan strategi pembangunan daerah pedesaan rendah emisi (LED-R). 35 dari yurisdiksi yang disurvei adalah anggota dari Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim & Hutan/GCF,⁷ sebuah kolaborasi dari 38 negara bagian dan provinsi yang bekerja untuk mempromosikan pendekatan yurisdiksi kepada REDD+ dan pembangunan rendah emisi. Pada tahun 2017-18, kami sudah mengkompilasi data sekunder dan melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan utama dalam semua yurisdiksi terkait tema-tema yang telah dijelaskan di atas. Dalam beberapa yurisdiksi, kami juga mengimplementasikan Perangkat Pengukur Lanskap Berkelanjutan/SLRT dari Climate, Community and Biodiversity Alliance untuk melengkapi evaluasi kami atas kemajuan dari LED-R (*lihat Kotak 3*). Sebagai tambahan untuk sintesis ini, laporan yang meliputi dua halaman analisis profil yurisdiksi singkat yang memberikan paparan kontekstual tiap yurisdiksi, menyoroti kebijakan atau program inovatif, kemajuan detail elemen inti dari keberlanjutan yurisdiksi, dan meringkas tantangan dan peluang khusus bagi yurisdiksi. Daftar lengkap yurisdiksi yang tercantum dalam studi ini, laporan dan profil, informasi detail tentang data dan metode tersedia daring di www.earthinnovation.org/state-of-jurisdictional-sustainability.

6 Jumlah yurisdiksi yang dimasukkan dalam tiap laporan analisis di sini bervariasi antara 33 dan 39, tergantung pada ketersediaan data untuk tiap analisis. Kami melaporkan jumlah yang dimasukkan dalam tiap analisis, dan mengindikasikan yurisdiksi mana yang tidak dicantumkan. Kebanyakan analisis dalam sintesis ini tidak memasukkan Pastaza, Huánuco, Piura, Roraima, Oromia, dan Papua.

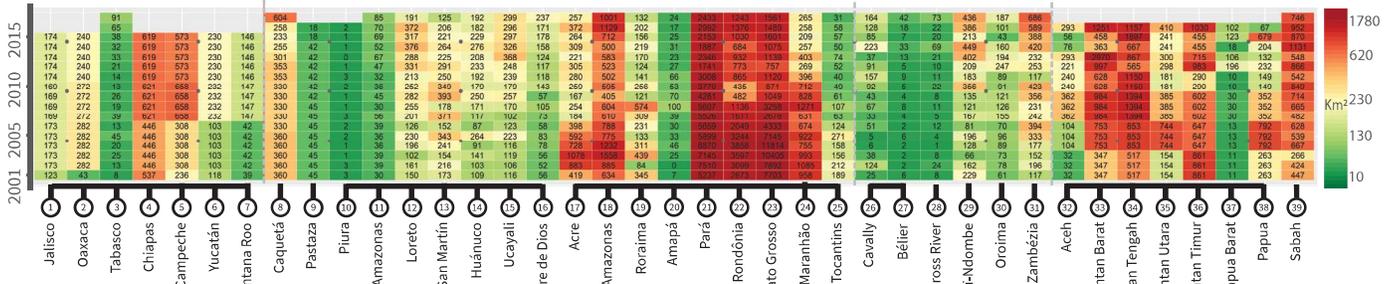
7 Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim & Hutan: <https://gctf.org/>

1. TREN DALAM DEFORESTASI & EMISI

A| Angka deforestasi tahunan 2001-2017 (%)



B| Deforestasi tahunan 2001-2017 (km²)

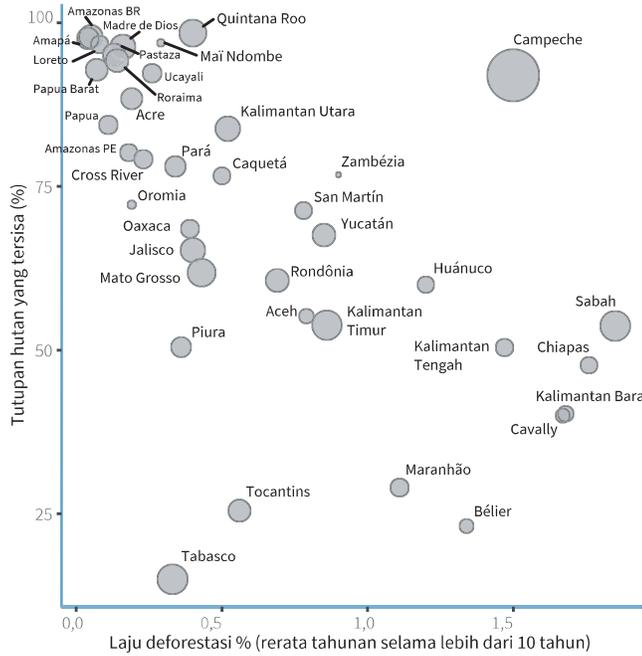


Gambar 2: Peta kebakanan dari deforestasi tahunan (persentase dan areal hutan tersisa yang hilang setiap tahun, secara berurutan) di tiap yurisdiksi dari 39 yurisdiksi setelah tahun 2001. Kumpulan peta ini memberikan paparan magnitudo & variasi spasial dan temporal dari deforestasi lintas yurisdiksi. Sumber: sistem pemantauan hutan nasional (Brasil, Kolombia, Ekuador, Meksiko, Peru & Indonesia); peta hutan nasional & data Hansen/UMD/Google/USGS/ NASA yang telah diproses oleh EII untuk yurisdiksi di negara-negara lainnya. Silakan lihat gambar halaman tengah untuk detail lebih jauh.

- Secara keseluruhan, hutan seluas 346.600 km² telah ditebang dari tahun 2000 hingga 2017 di total 39 yurisdiksi.
- Ditilik bersama, deforestasi mulai menurun setelah tahun 2005, mencapai titik terendah di tahun 2012 dan sebagian besar telah stabil dengan sedikit peningkatan sejak saat itu. Walaupun begitu, tren ini menutupi variasi signifikan di dalam wilayah dan yurisdiksi tertentu pada periode yang sama.
- Deforestasi tahunan telah menurun dalam lima tahun terakhir di 17 dari 39 yurisdiksi dengan tingkat median sebesar 0,02% per tahun.
- Sekitar separuh yurisdiksi telah mengurangi deforestasi

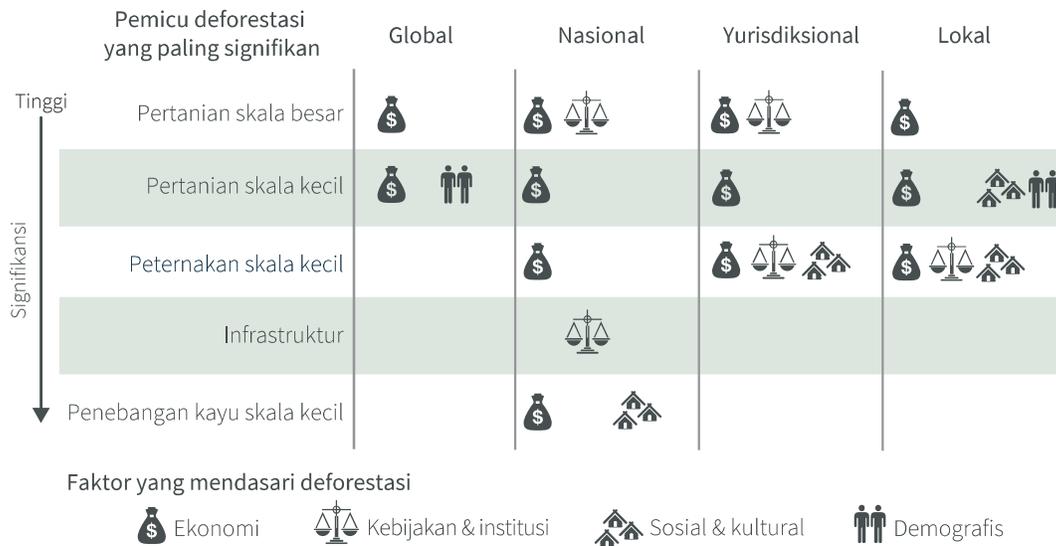
- di bawah FREL mereka dalam lima tahun terakhir. Negara bagian Brasil menyatakan telah menghindari deforestasi di lahan seluas 112.734 km² dengan mengurangi hilangnya hutan mereka di bawah FREL dari tahun 2007 hingga 2017.
- Di 39 yurisdiksi, 80% dari hutan alami yang masih ada – atau 4,98 juta km² – masih tersisa, dengan total stok karbon 69,2 miliar ton.
- 28 yurisdiksi mengalami pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir, ditandai dengan peningkatan rerata PDB sebesar 6,28%. Di hampir seluruh daerah, pertumbuhan ekonomi nampak dipisahkan dari deforestasi (Gbr. 3; Halaman tengah).

STATUS YURISDIKSI BERKELANJUTAN



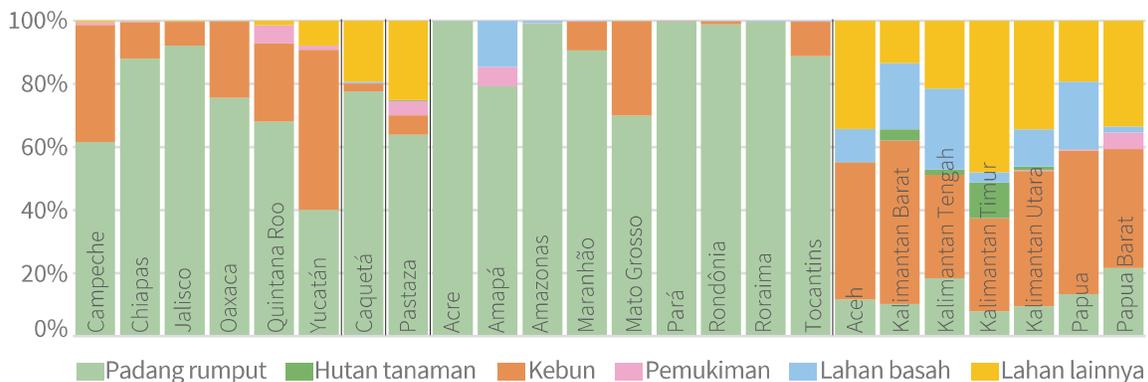
Gambar 3: Kami mengkaji 39 yurisdiksi sesuai dengan rerata deforestasi tahunan (% dari hutan tersisa) selama lebih dari sepuluh tahun & persentase dari hutan alami yang masih ada yang tersisa. Besaran dari tiap yurisdiksi merefleksikan PDB per kapita. Walaupun yurisdiksi yang dikaji dikelompokkan di pojok kiri atas di plot tersebar - berarti mereka memiliki porsi besar dari hutan alami yang masih ada yang tersisa dan angka rendah deforestasi - situasi tingkat penebangan/ deforestasi hutan lainnya juga direpresentasikan dalam studi ini. Di sebelah kanan, pembagian kolektif dari produksi komoditas di daerah tropis, areal hutan tropis, stok karbon dan populasi hutan tropis telah diringkas. Metode dan sumber data telah diringkas di <https://earthinnovation.org/state-of-jurisdictional-sustainability>

PEMICU DEFORESTASI



Gambar 4: Kami telah menyurvei pemangku kepentingan utama terkait pemahaman mereka mengenai pemicu deforestasi paling signifikan di 37 yurisdiksi yang dipelajari. Kami melengkapi respons ini dengan sumber sekunder dan menganalisis respons-respons tersebut dengan yurisdiksi yang sedang disurvei. Tiap ikon merepresentasikan sekelompok faktor mendasari yang memicu deforestasi yang mungkin berlaku di skala global, nasional atau yurisdiksi: Ekonomi (pasar, biaya ekonomis/pengembalian dari aktivitas penggunaan lahan, kemiskinan dan guncangan-guncangan ekonomi); kebijakan & institusi (kebijakan umum resmi, kebijakan iklim, hak milik, dan perubahan rezim); sosial & kultural (perilaku dan kepercayaan publik, rumah tangga, perilaku individu atau perusahaan); Demografis (pertumbuhan penduduk, migrasi dan urbanisasi). Data tidak tersedia untuk: Oaxaca & Pastaza.

- Pertanian skala besar disebut dalam survei sebagai pemicu deforestasi paling signifikan di seluruh daerah (Gbr. 4).
- Peternakan skala kecil disebut sebagai pemicu signifikan deforestasi di Amerika Latin, begitu juga dengan pertanian skala besar dan kecil. Hal ini dikonfirmasi dengan analisis peta tutupan lahan (Gbr. 5).
- Pertanian tanaman tahunan (contoh, kacang kedelai, pisang, tebu) dan tanaman permanen (contoh, kelapa sawit) disebut sebagai pemicu signifikan deforestasi di Amerika Latin & Asia Tenggara, berurutan.
- Pertanian skala kecil disebut sebagai pemicu utama deforestasi di yurisdiksi Afrika. Tanaman pada umumnya termasuk ubi, ketela dan beberapa komoditi lainnya seperti kakao.
- Secara bersamaan, penebangan ilegal dan kegiatan penambangan dalam berbagai skala disebut sebagai pemicu signifikan lain bagi deforestasi dan degradasi hutan di berbagai daerah.
- Kebakaran adalah pemicu lain yang kerap disebut sebagai pemicu degradasi hutan. Walaupun kebanyakan awalnya antropogenik, niat dari menyalakan api tak selalu jelas; penelitian lebih lanjut terkait hal ini diperlukan.
- Perkembangan infrastruktur & urbanisasi adalah pemicu lain deforestasi di beberapa yurisdiksi.



Gambar 5: Kami menghitung transisi spasial lahan hutan (sejak tahun 2000) hingga tutupan lahan lainnya dari tahun 2001-2015 berdasarkan analisa lahan regional dari peta tutupan lahan. Konversi dari lahan hutan ke padang rumput untuk menggembala ternak, perkebunan, pemukiman, lahan basah, hutan tanaman & lahan lain yang terpetakan. Kami melakukan analisis pada 22 wilayah yurisdiksi dimana kami dapat memperoleh data yang diperlukan. Peta tutupan lahan yang dipergunakan: Brasil (Mapbiomas v.2.3); Indonesia: Peta tutupan lahan yang diperoleh dari Kementerian Kehutanan; Meksiko: peta INEGI LULC yang telah diproses CONAFOR. Lahan hutan stabil selama periode 2000-2016 dihilangkan dari analisis.

2. KOMITMEN: NIAT VS AKSI

Komitmen kuat dan keterikatan waktu, target performa yang kuantitatif adalah komponen penting dari strategi yurisdiksi LED-R.⁸ Negara-negara yang secara nasional menentukan kontribusinya (Nationally Determined Contributions/NDCs) di bawah Peretujuan Paris secara umum tidak mendefinisikan kontribusi tingkat subnasional untuk memenuhi komitmen nasional. Tetapi komitmen subnasional (contoh: Deklarasi Rio Branco, Under2MOU) dan aksinya penting untuk menjembatani jurang antara alur pengurangan emisi saat ini dan tujuan NDC.⁹ Target performa yang jelas pada tingkat subnasional membantu memastikan pelaku dalam berbagai sektor dalam yurisdiksi ini berjuang meraih tujuan yang sama melalui kebijakan strategis, program dan inisiatif, dan kemajuannya dapat diukur. Mereka juga dapat membantu mempengaruhi yurisdiksi untuk mengarahkan pembiayaan dari penyandang dana internasional atau perusahaan.

NIAT: JANJI YANG DIBUAT OLEH YURISDIKSI

Banyak yurisdiksi yang berkomitmen resmi untuk mengurangi deforestasi, mengurangi emisi, memperbaiki lahan rusak, dan mempromosikan pembangunan ekonomi dan inklusi sosial yang berkelanjutan (Tabel 1).

Sebagai tambahan pada janji yang tercantum di Tabel 1, beberapa yurisdiksi juga telah mencantumkan target berkaitan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan, inklusi sosial dan hak, perbaikan mata pencaharian lokal, dan lainnya yang terkait dengan pertanian berkelanjutan, melampaui area dari NYDF.

Tabel 1: Komitmen yurisdiksi dalam janji internasional

NAMA KOMITMEN	TUJUAN	JUMLAH YURISDIKSI (DARI 39)	TARGET
Deklarasi Rio Branco (RBD)	Mengurangi deforestasi Meningkatkan penghidupan pedesaan dan mengurangi kemiskinan	35	Mengurangi deforestasi hingga 80% dibawah garis dasar pada tahun 2020, tergantung pada performa pembiayaan dari komunitas internasional Memberikan pembagian substansial dari manfaat berdasarkan performa pada komunitas berbasis hutan, masyarakat adat, dan petani kecil melalui mekanisme yang jelas dan transparan
Under2 MOU (U2MOU)	Mengurangi emisi	27 ¹⁰	Membatasi emisi hingga 80-95% di bawah level 1990, atau di bawah 2 tahunan metrik ton per kapita pada 2050 ¹¹
Bonn Challenge	Mempromosikan reforestasi/ restorasi	31 ¹²	Secara global: Merestorasi 150 juta hektar lahan yang terdegradasi dan terdeforestasi pada 2020, dan 350 juta hektar pada 2030 ¹³
New York Declaration on Forests (NYDF)	Mengurangi deforestasi Mempromosikan pertanian berkelanjutan	18 ¹⁴	Mengurangi hingga separuh hilangnya hutan alami di 2020 dan berjuang untuk mengakhirinya di tahun 2030; Mendukung target pihak swasta untuk menyudahi deforestasi dalam usaha memproduksi komoditas pertanian di 2020; Mengurangi deforestasi yang diawali dari sektor lainnya di 2020, dan lain-lain.

8 D. Nepstad, dkk. 2013. "More Food, More Forest, Few Emissions, Better Livelihoods: Linking REDD+, Sustainable Supply Chains and Domestic Policy in Brazil, Indonesia and Colombia." Carbon Management 4 (6): 639–58; EII (Earth Innovation Institute). 2017. Jurisdictional Sustainability: A Primer for Practitioners. San Francisco, CA: EII. http://earthinnovation.org/wp-content/uploads/2017/02/JS-primer_Englishonline.pdf.

9 Data Driven Yale, Institut NewClimate, PBL 2018: Global climate action of regions, states and businesses. Tersedia di <http://bit.ly/yale-nci-pbl-global-climate-action>.

10 Meksiko dan Peru telah mengesahkan MOU di tingkat nasional, selain komitmen di tingkat sub-nasional

11 Pihak-pihak yang bertanda tangan berkomitmen untuk menyerahkan Apendiks Yurisdiksional, menentukan serangkaian aksi unik untuk mencapai tujuan serta target tengah semester pengurangan emisi 2030. Hingga saat ini, 18 dari 27 yurisdiksi yang telah menandatangani U2MOU juga telah menyerahkan Apendiks Yurisdiksional mereka.

12 Komitmen terhadap Bonn Challenge dibuat pada tingkat nasional. 31 dari 39 yurisdiksi pada studi ini berada di 10 negara yang berbeda, yang berkomitmen pada Bonn Challenge. Sebagai tambahan, 4 negara bagian Meksiko (Campeche, Yukatán, Chiapas, Quintana Roo) telah menyatakan komitmen restorasi tingkat negara bagian dalam Bonn Challenge, di posisi atas tiap negara bagian dalam komitmen nasional.

13 Pihak penanda tangan menentukan komitmen individu mereka, termasuk keterikatan waktu dan target restorasi kuantitatif dan manfaat ekonomi dan iklim kuantitatifnya (karbon tersekustrasi).

14 Kolombia, Pantai Gading, Republik Demokrasi Kongo, Indonesia, Meksiko, dan Peru telah mengesahkan NYDF di tingkat nasional, disamping komitmen sub-nasional. Semua yurisdiksi yang telah mengesahkan NYDF juga merupakan penandatanganan RBD dan U2MOU.

KOTAK 2. MATO GROSSO, BRASIL: PRODUKSI, MELESTARIKAN, TERMASUK STRATEGI (PCI)

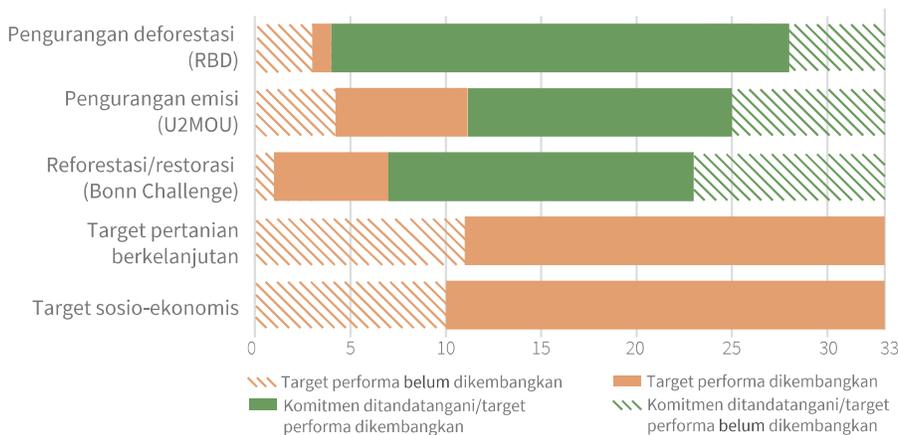
Strategi PCI Mato Grosso diluncurkan pada tahun 2015, termasuk 21 target bertenggat waktu kuantitatif yang menyatukan pelaku dan sektor dalam memajukan yurisdiksi menuju LED-R. PCI merefleksikan konteks unik Mato Grosso dengan target fokus meningkatkan produktifitas ternak dan perkebunan (contoh: lebih tingginya hasil daging, meningkatkan areal kedelai, jagung dan katun yang ditanam di lahan terdegradasi, dari 9,5 hingga 12,5 juta ha di tahun 2030), mengurangi deforestasi (dari kedua rerata tahunan dan minimum 60% dari vegetasi asli negara bagian), dan meningkatkan inklusi sosio-ekonomi petani penggarap (contoh: memperluas bantuan teknis dari 30% hingga 100% bagi petani penggarap di tahun 2030), diantaranya. Target-target tersebut memiliki keluaran implisit di seluruh negara dari nol deforestasi dan nol emisi karbon hutan bersih di tahun 2030 dan akan menahan ~6 GtCO₂e dari atmosfer. Target dibentuk melalui proses partisipatoris yang mengikutsertakan pelaku dari umum, swasta, dan sektor nonprofit; pelaksanaannya diawasi oleh komite eksekutif multi pemangku kepentingan formal. Dikarenakan Strategi PCI Mato Grosso dan perundangan REDD+, Mato Grosso memenangkan kontrak dengan Jerman dan Britania Raya dalam pembiayaan berbasis performa sebesar USD 50 juta.¹⁵



AKSI: MENGINTERNALISASI JANJI MELALUI TARGET PERFORMA

Komitmen subnasional yang dijelaskan di atas, berkontribusi pada aksi iklim di tingkat internasional; walaupun mereka tidak mengindikasikan apakah sebuah yurisdiksi telah mengembangkan sebuah target performa tertentu atau menerapkan langkah-langkah demi mencapai target tersebut. Sebagai contoh, menandatangani Deklarasi Rio Branco tidak menjamin bahwa sebuah yurisdiksi telah mengevaluasi potensi pengurangan deforestasinya dan memformulasikan target realistis berdasarkan konteks dan titik awalnya. Tidak juga menjamin pelaku di lapangan sadar akan atau berkontribusi terhadap pencapaian tujuan.

Hasil pada Gambar 6 menunjukkan bahwa yurisdiksi individual membangun target performa yang merefleksikan titik awal mereka yang unik, kapasitas dan kebutuhan. Ini penting, mengingat banyak dari target ini dikembangkan dalam kerangka kerja di tingkat nasional, beragam dari pelaksanaan subnasional dari peraturan nasional (contoh: RAN-GRK provinsi-provinsi di Indonesia,¹⁷ PDRC di wilayah Peru,¹⁸ PPCD di negara bagian di Brasil¹⁹) hingga konteks perjanjian pembiayaan multilateral dengan negara-negara tropis (contoh: Maï Ndombe FCPF Program Pengurangan Emisi, DRC-CAFI Surat Pernyataan Minat). Contoh-contoh berikut menunjukkan bagaimana kerangka kerja tingkat nasional dapat mendorong aksi subnasional pada tujuan internasional, dan mungkin lebih relevan/berat dalam yurisdiksi daripada menandatangani janji internasional.



Gambar 6: Jumlah yurisdiksi yang telah menetapkan target tingkat subnasional terkait dengan komitmen tingkat internasional mereka¹⁶. Grafik batang hijau solid mengindikasikan jumlah yurisdiksi yang telah menandatangani RBD, U2MOU dan Bonn Challenge, dan yang telah mengembangkan target performa terkait tujuan tersebut. Grafik batang oranye solid mewakili yurisdiksi yang belum menandatangani janji internasional tapi telah memiliki target yang sama. Pada grafik bar *Pertanian berkelanjutan* dan *Sosio-ekonomis*, ketiadaan bagian hijau mengindikasikan bahwa meski beberapa yurisdiksi telah memiliki target dalam kategori ini tapi mereka tetap tidak berhubungan dengan komitmen berskala global apapun yang dipergunakan dalam analisis kami.

¹⁵ Lihat D. Nepstad, dkk., 2018. "Mato Grosso, Brazil": https://earthinnovation.org/wp-content/uploads/2014/09/Profile_MATOGROSSO_2018_ENG.pdf; Silakan kunjungi www.pci.mt.gov.br & www.pcimonitor.org untuk informasi lebih lanjut tentang PCI.

¹⁶ Analisis ini tidak mempertimbangkan apakah target tingkat subnasional itu lebih, kurang, atau sama ambisiusnya dengan target tingkatan yang lebih tinggi, dan termasuk 33 yurisdiksi (kecuali Roraima, Piura, Pastaza, Oaxaca, Tabasco, dan Papua).

¹⁷ Rencana Aksi Nasional Indonesia untuk Pengurangan Emisi GRK (RAN-GRK) mensyaratkan provinsi-provinsi untuk mengembangkan Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Emisi GRK (RAD-GRK).

¹⁸ Wilayah Peru harus mengembangkan Rencana Pembangunan Regional Terpadu (PDRC), disyaratkan oleh kerangka kerja dari Sistem Perencanaan Strategi Nasional dan Rencana Pembangunan Strategi Nasional (PEDN).

¹⁹ Rencana Aksi Brasil untuk Pencegahan dan Pengendalian Deforestasi di Legal Amazon (PPCDAm) dan Rencana Aksi untuk Pencegahan dan Pengendalian Deforestasi di Cerrado (PPCerrado) mensyaratkan implementasi tingkat negara untuk rencana paralel.

PROGRES: MELANGKAH MAJU MENCAPAI TARGET LEWAT KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INISIATIF UTAMA

Intervensi bertujuan mengurangi deforestasi dan emisi; mempromosikan restorasi, reforestasi dan pertanian berkelanjutan; dan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusi sosial yang penting bagi yurisdiksi untuk mencapai target performa mereka.

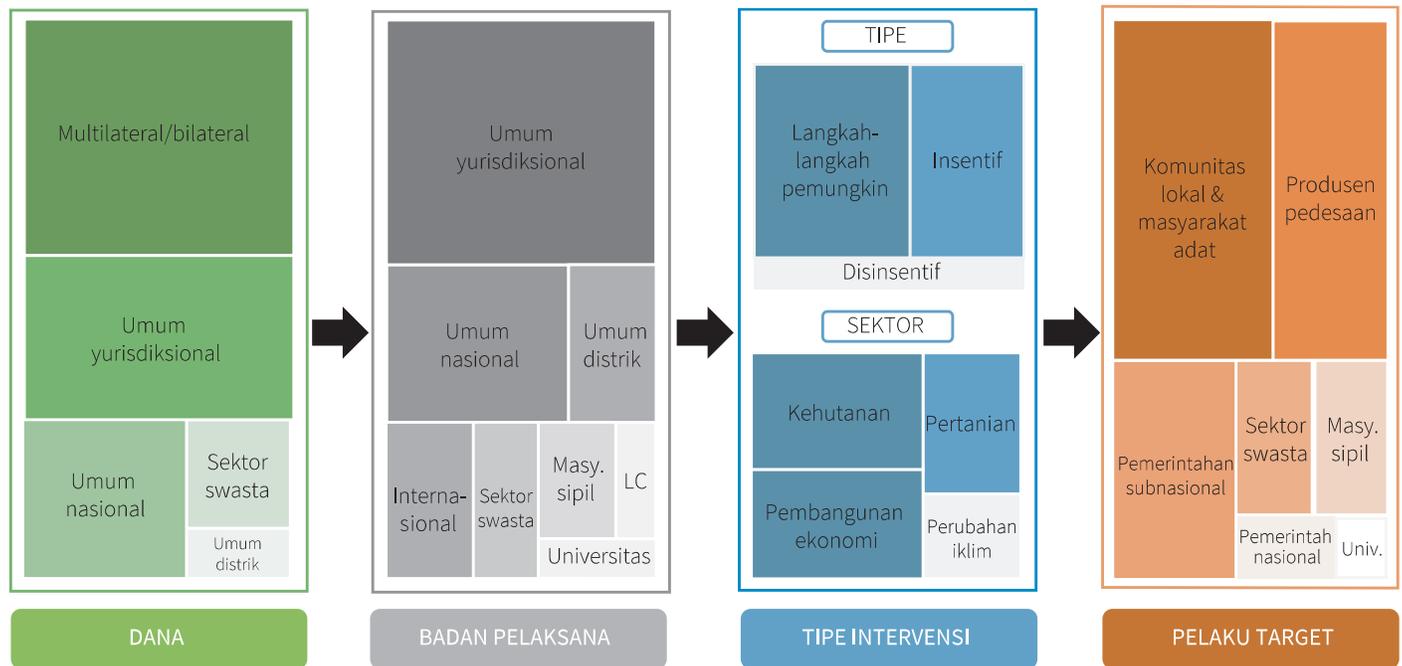
Intervensi penting umumnya didanai oleh penyandang dana multilateral dan bilateral, diikuti dengan anggaran dari tiap yurisdiksi dan pemerintah nasional. Kebanyakan dari kebijakan publik dan program dilaksanakan oleh pemerintah tingkat provinsi dan nasional, dimana beberapa diantaranya memiliki komite pengarah multi pemangku kepentingan, seperti contohnya Strategi PCI Mato Grosso (*lihat Kotak 2*).

Walaupun intervensi penting kebanyakan berfokus kepada pembangunan kehutanan dan ekonomi, hampir semuanya memiliki lebih dari satu fokus. Pada umumnya memasukkan langkah-langkah pemungkin untuk meningkatkan kondisi tata kelola, seperti tata ruang, klarifikasi tenurial dan memperkuat institusi lokal. Banyak yang memasukkan upaya-upaya berbasis insentif, mulai yang mencakup luasnya kebijakan pertumbuhan hijau (contoh: Kalimantan Timur, Indonesia), hingga program Pembayaran Jasa Lingkungan (PES) (contoh: di Quintana Roo dan Chiapas, Meksiko), ke inisiatif yang mendukung lebih banyak produksi pertanian berkelanjutan (contoh: kakao di Huánuco, Peru) hingga peningkatan nilai produksi hutan (Amapá, Brasil). Sejumlah kecil intervensi menyertakan disinsentif, seperti batasan pemanfaatan dan akses ke hutan, yang selalu dikombinasikan dengan komponen berbasis insentif.



Kebanyakan intervensi mengarah kepada masyarakat adat dan komunitas lokal untuk mendukung peran mereka dalam mengatur (seringkali) luasnya areal hutan tropis, diikuti mereka yang menjadi produsen pedesaan (termasuk petani penggarap) untuk mengenalkan transisi ke praktik produksi yang lebih berkelanjutan. Banyak juga yang berfokus untuk memperkuat kapasitas tata kelola tingkat provinsi dan distrik.

Hasil-hasil ini menunjukkan aksi yang jelas oleh pemerintah subnasional dalam pembiayaan dan pelaksanaan kebijakan, program dan inisiatif yang berkelanjutan. Penyandang dana internasional, pemerintah tingkat nasional, sektor swasta dan beragam pelaku lokal berperan penting dalam progres ini. Akhirnya, adanya insentif dan dedikasi untuk melibatkan masyarakat adat, komunitas lokal, dan petani penggarap sebagai penerima manfaat utama intervensi-intervensi ini memberikan titik cerah untuk tercapainya tujuan pembangunan dan iklim.



Gambar 7: Karakteristik dari 4-5 intervensi utama yang didokumentasikan per yurisdiksi (untuk 33 studi yurisdiksi – kecuali Piura, Pastaza, Roraima, Oaxaca, Tabasco, dan Papua) berkaitan dengan sumber pendanaan, badan pelaksana, tipe intervensi, dan pelaku target. Mohon dicatat bahwa satu intervensi dapat memiliki lebih dari satu kategori (contoh: langkah-langkah pemungkin, insentif, disinsentif) di dalam suatu karakteristik (contoh: tipe intervensi, sektor, pelaku target) bagi seluruh karakteristik.

KOTAK 3. MEMBANGUN KREDIBILITAS BAGI PROGRES YURISDIKSI MENUJU KEBERLANJUTAN

Salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi kemampuan yurisdiksi untuk menarik kemitraan adalah kredibilitas. Apakah usaha yurisdiksi menunjukkan progres yang sesungguhnya melampaui dan di atas alur pembangunan “normal”? Apakah progres ini telah diverifikasi dan diterima secara luas?

Salah satu pendekatan yang sering dipergunakan untuk menciptakan kredibilitas adalah menggunakan standar keberlanjutan internasional. Prinsip, kriteria dan indikator untuk mengevaluasi praktik dan dampak dibentuk dan diaplikasikan untuk menentukan keberlanjutan produksi, sebuah pendekatan yang banyak dipergunakan untuk pertanian dan komoditas hutan. Setelah disertifikasi dengan prinsip-prinsip dan kriteria ini, produk dari sebuah pertanian atau pengolahan bisa dianggap “berkelanjutan” dan akan dicari di beberapa pasar. Pembatasan standar internasional ini dikarenakan mereka tak terlalu efektif dalam “mengarusutamakan” keberlanjutan, yakni, membawa perubahan skala-besar menuju keberlanjutan diantara para produsen yang menyebabkan kerusakan besar.²⁰

Dalam kasus pendekatan yurisdiksi dimana progres menuju keberlanjutan dalam skala geografi politis yang luas masih cukup, dibutuhkan sistem yang mampu mengenali dan memberi imbalan pada langkah awal menuju keberlanjutan yurisdiksi - tak hanya langkah akhir - dan yang mampu merespons permintaan dari beragam tipe kemitraan.

Sistem dan alat pengukur baru untuk mengkaji keberlanjutan yurisdiksi telah dikembangkan. *Landscape Standard*²¹ bertujuan untuk membantu perusahaan, pemerintah dan penyandang dana untuk menilai, melaporkan dan mengklaim keberlanjutan lanskap produksi. Pendekatan Komoditas/ Yurisdiksi²² mengidentifikasi yurisdiksi yang memenuhi kriteria kelayakan untuk sumber preferensial yang ditetapkan Unilever dan Marks & Spencer.

Kerangka Kerja Pengkajian Lanskap²³ lebih fleksibel, menyediakan kerangka kerja bagi pilar keberlanjutan yang dapat dipergunakan pelaku lanskap dan pemerintah untuk mengatur informasi dan mengkomunikasikan progres terkait tujuan keberlanjutan lanskap yang mereka buat sendiri, untuk memfasilitasi manajemen adaptif sebagaimana kemitraan atau investasi untuk mendorong tujuan tersebut. Alat Pemeringkat Lanskap Berkelanjutan²⁴ dapat digunakan untuk mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi standar tentang kebijakan yurisdiksi dan tata kelola.

Langkah awal penting adalah untuk mengakses dan melaporkan secara reliabel apa yang telah dilakukan yurisdiksi untuk perubahan ke arah keberlanjutan dan apa dampak dari perubahan tersebut, yang merupakan motif untuk evaluasi global dan untuk GCFImpact.org platform daring (*lihat Kotak 6*). Mengetahui kondisi dari keberlanjutan yurisdiksional ini akan membantu memajukan sistem yang ada dan masa mendatang untuk melacak kemajuan dan mendorong kemitraan.



20 <https://news.mongabay.com/2017/11/it-is-time-to-recognize-the-limits-of-certification-in-agriculture-commentary/>

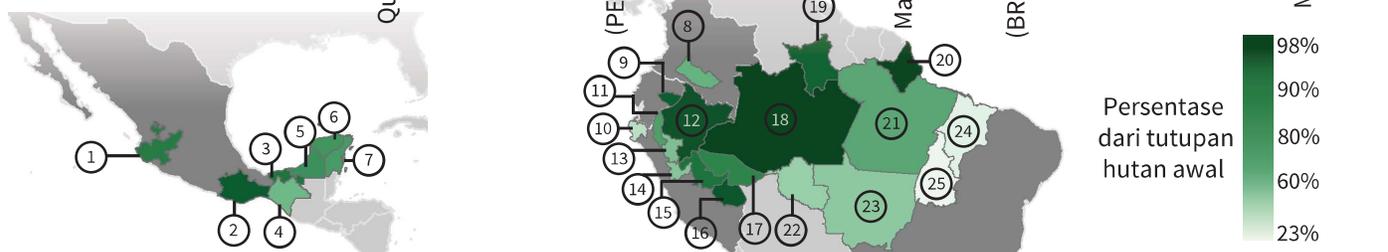
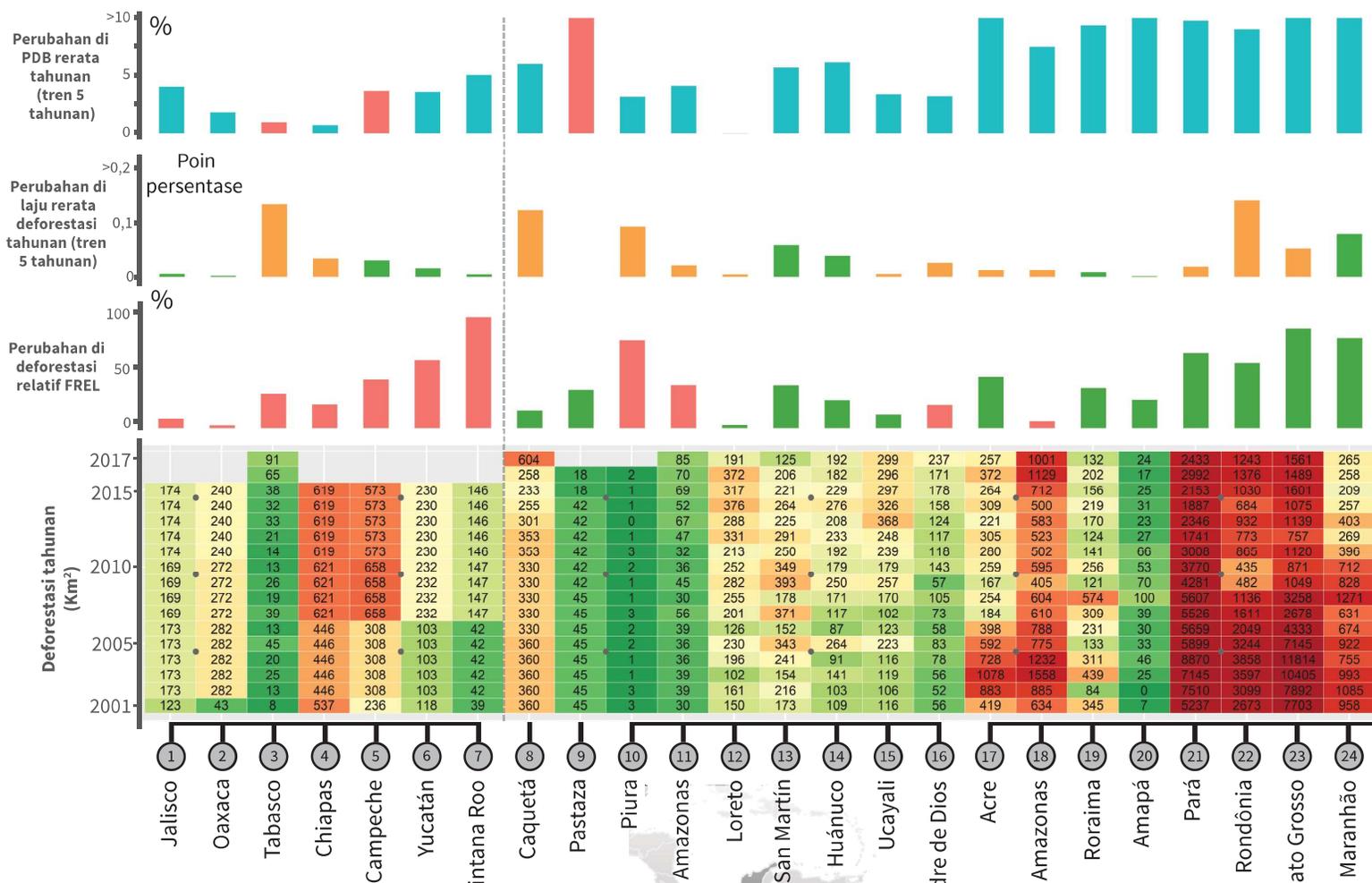
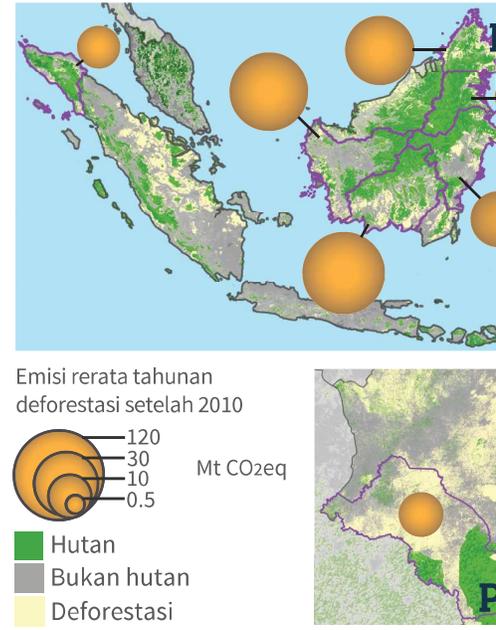
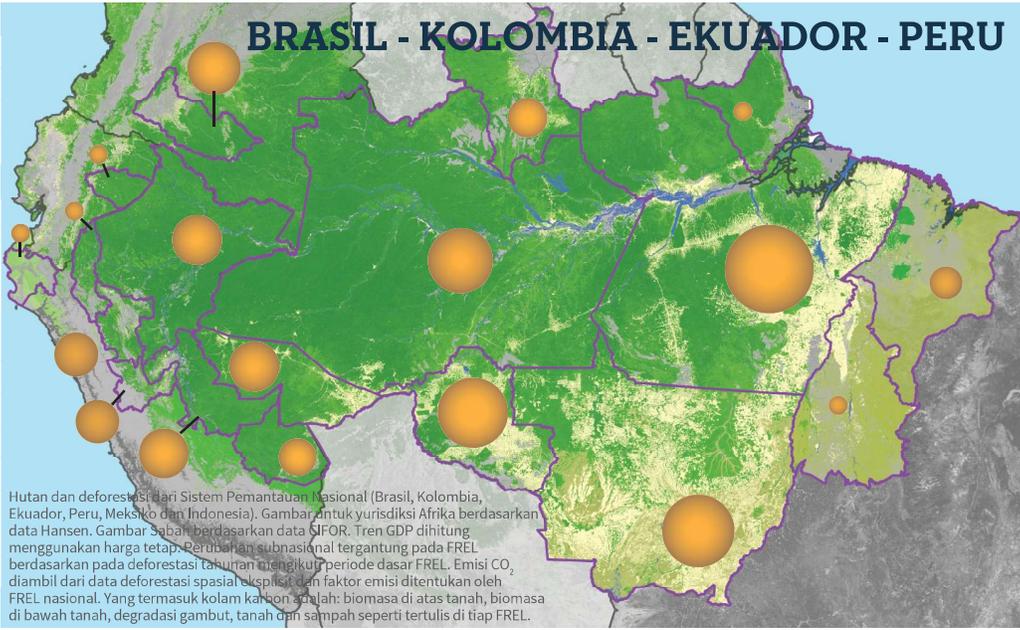
21 <http://verra.org/project/landscape-standard/>

22 <https://commoditiesjurisdictions.wordpress.com/>

23 <https://www.conservation.org/projects/Pages/Landscape-Assessment-Framework.aspx>

24 <http://www.climate-standards.org/sustainable-landscapes-rating-tool/>

BRASIL - KOLOMBIA - EKUADOR - PERU



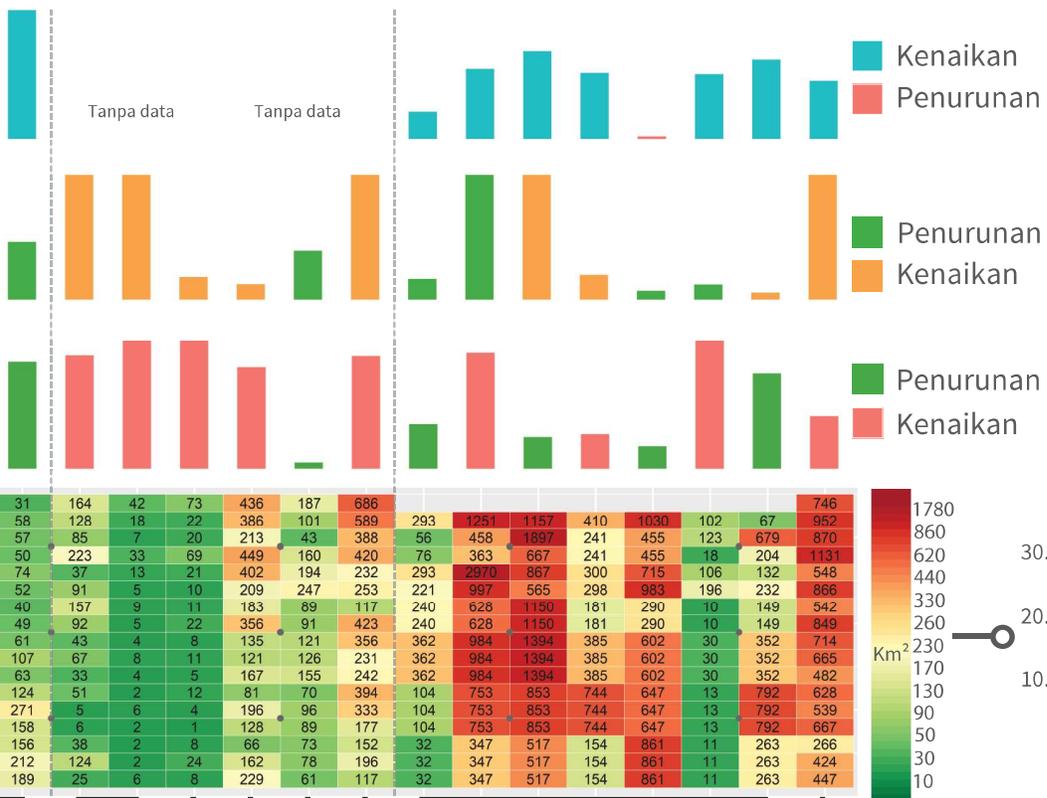
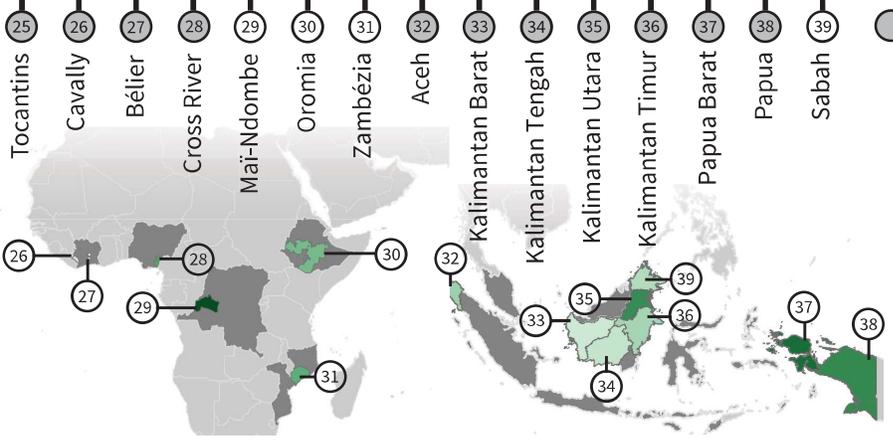
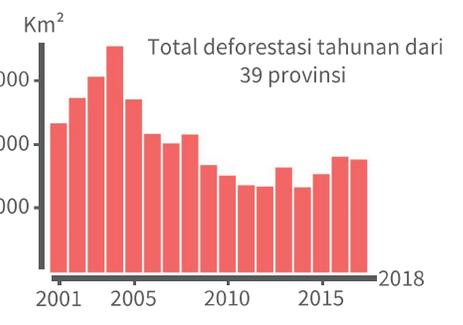


FOTO GLOBAL:

- 39** Yurisdiksi Subnasional dari hutan tropis dunia
- 28%** dari stok karbon hutan tropis dunia
- 33%** GtCO₂e emisi terhindarkan*
- 6,8** GtCO₂e emisi terhindarkan*



* Jangka waktu untuk penghitungan emisi terhindarkan di yurisdiksi ditentukan oleh FREL nasional. Emisi terhindarkan dikuantifikasi untuk Brazil setelah 2005, Columbia setelah 2012, Pantai Gading setelah 2014, Republik Demokrasi Kongo setelah 2014, Ekuador setelah 2008, Ethiopia setelah 2014, Malaysia setelah 2015, Meksiko setelah 2010, Mozambik setelah 2012, Nigeria setelah 2014, Indonesia setelah 2012, Peru setelah 2014.

REFERENSI & SUMBER DATA LENGKAP TERSEDIA DI www.earthinnovation.org/state-of-jurisdictional-sustainability
 Peta dinamis tersedia di <http://gcfimpact.org/maps>



3. PROGRES MENUJU YURISDIKSI BERKELANJUTAN

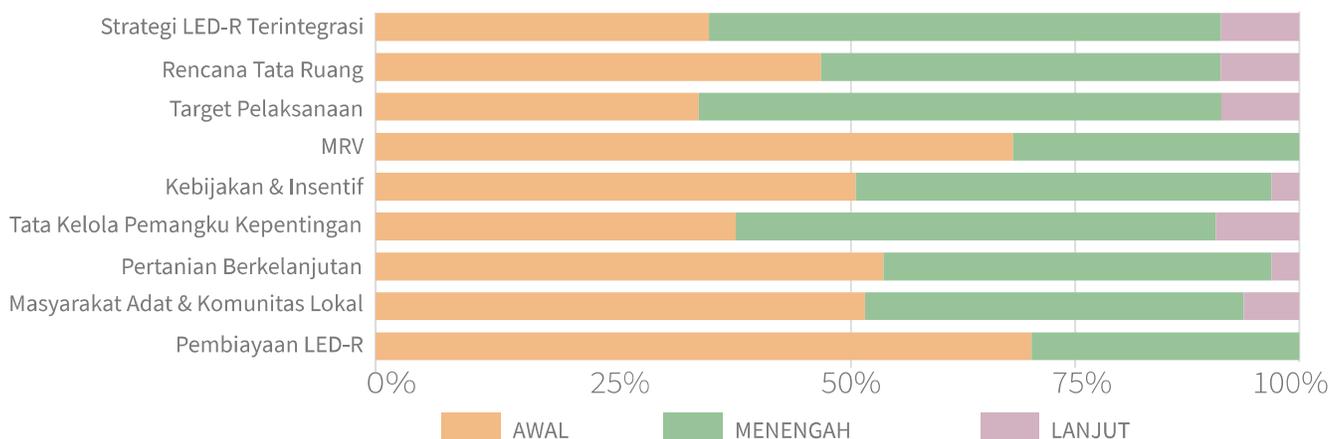
Kami mengkaji kemajuan dari yurisdiksi berkelanjutan berdasarkan 9 elemen kunci (Tabel 2). Untuk tiap elemen, sebuah yurisdiksi diukur sebagai “Awal”, “Menengah” atau “Lanjut” dalam progresnya. Kategori “Menengah” relatif luas dibandingkan “Awal” dan “Lanjut”: lebih mudah untuk mendefinisikan permulaan serta kebijakan mutakhir dan aksi lainnya, sebagai akhir dari skala ini. Kategori “Menengah” termasuk yurisdiksi yang sedikit lebih maju dari kriteria minimal, begitu juga dengan yang serangkaian penuh kriterianya masih kurang untuk ke tingkatan “Lanjut”. Analisis yang kami sediakan mewakili interpretasi awal dari data terkumpul di 33 yurisdiksi dari 39 yurisdiksi.²⁵



Kredit Foto: D. McGrath

Tabel 2: Deskripsi dari kriteria yang digunakan untuk mengkaji tiap progresnya dari 9 elemen kunci yurisdiksi berkelanjutan. Untuk informasi lebih lanjut tentang kriteria peringkat di tiap elemen, silakan kunjungi <https://earthinnovation.org/state-of-jurisdictional-sustainability>.

ELEMEN	KRITERIA
Strategi LED-R Terintegrasi	Adanya strategi yurisdiksi dan rencana aksi, yang menjelaskan visi dan strategi yurisdiksi, menyebutkan seluruh pemacu signifikan, yang kemudian secara resmi disetujui dan diadopsi oleh pemerintah dan melibatkan partisipasi pemangku kepentingan yang luas dalam perkembangan dan pelaksanaannya.
Rencana Tata Ruang	Adanya rencana spasial yurisdiksi yang memiliki basis ekologi, mengenali lahan dan sumber daya lokal, ulayat dan adat, memitigasi dampak sosial dan lingkungan yang negatif dari proyek infrastruktur yang direncanakan, dan melibatkan pemangku kepentingan dalam pembangunannya.
Target Pelaksanaan	Adanya tujuan yang resmi, realistis, bertenggat waktu, dapat diukur bagi keseluruhan yurisdiksi, yang dibangun dengan partisipasi luas pemangku kepentingan.
Pemantauan, Pelaporan & Verifikasi (MRV)	Sejauh mana sistem MRV yurisdiksi dapat diandalkan, akurat dan dengan jelas memberikan laporan tentang dukungan pemerintah tentang hutan, emisi GRK tata guna lahan, keanekaragaman hayati, indikator ekonomi & sosial, dll., dan digunakan untuk mengevaluasi target performa dan strategi LED-R terpadu.
Kebijakan & Insentif	Kelengkapan dan penyelarasan kebijakan dan insentif sedang dikembangkan atau sudah terlaksana pada seluruh sektor relevan terkait tata guna lahan; sejauh mana kerangka kerja mendukung sejumlah pemangku kepentingan untuk aktif dalam praktik berkelanjutan.
Tata Kelola Pemangku Kepentingan	Keberadaan dan luasnya perwakilan pemangku kepentingan atau lembaga pemerintah terkait tata guna lahan yang relevan, dan isu lainnya yang terkait dengan kelestarian sebagaimana peran resmi mereka dalam pengambilan keputusan dan tata kelola.
Pertanian Berkelanjutan	Keberadaan, kualitas dan akses dari upaya-upaya untuk mengembangkan keberlanjutan sektor pertanian dengan lebih luas, baik yang sudah terlaksana atau yang masih dalam perbaikan (termasuk produksi perkebunan dan peternakan skala besar maupun kecil).
Masyarakat adat (IP) & Komunitas Lokal (LC)	Sejauh mana IP/LC tenurial dan sumber daya, manajemen, eksklusi dan hak guna dijelaskan dalam undang-undang; dan IP/LC dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan regional, dan struktur pembagian manfaat.
Pembiayaan LED-R	Ketersediaan dan pembiayaan untuk mendukung dan memberi insentif bagi pengembangan dan pelaksanaan strategi LED-R dan program, inisiatif atau aktivitas terkait.



Gambar 8: Kategori peringkat distribusi dari 33 yurisdiksi yang dipelajari.

²⁵ Roraima, Pastaza, Piura, Oaxaca, Tabasco, Papua tidak termasuk dalam analisis ini.

Secara umum, yurisdiksi berada di tahap “Awal” atau “Menengah” dalam progres mereka menuju yurisdiksi berkelanjutan. Kemajuannya lambat dalam melaksanakan sistem MRV yang kuat, transparan dan aksesibel, menciptakan kebijakan yang diperlukan, dukungan teknis dan finansial untuk transisi menuju pertanian berkelanjutan, dan mengamankan dana yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesiapan dan pelaksanaan

LED-R. Secara kelompok, yurisdiksi paling maju dalam rencana tata ruang dan proses pemangku kepentingan yang berhubungan dengan LED-R, walau separuh dari yurisdiksi yang ada masih tergolong “Menengah” dalam kategori ini (Gbr. 8, Tabel 3). Penggolongan “Awal”, “Menengah”, dan “Lanjut” sebaiknya dilihat sebagai indikasi dari tipe dukungan yang dibutuhkan oleh yurisdiksi untuk melangkah lebih jauh dengan strategi LED-R mereka.

Tabel 3: Untuk tiap elemen yang dijelaskan di Tabel 2, kami menjelaskan angka rerata untuk grup yurisdiksi yang disurvei, sebagaimana isu-isu umum, tantangan dan peluang berkaitan dengan tiap elemen.

	○ AWAL	◐ MENENGAH	● LANJUT
Strategi LED-R Terintegrasi	◐	●	• 21 dari 33 yurisdiksi memiliki rencana atau strategi yurisdiksi yang luas dan siap dilaksanakan tapi hanya tiga diantaranya (Rencana Tata Kelola dan Berkelanjutan multi tahunan 2016-19 dari Acre, Penghematan Produksi Disertai Strategi dari Mato Grosso, Rencana Aksi Strategi Jangka Panjang 2016 - 2035 dari Sabah) yang membawa emisi berbasis lahan di seluruh penjuror sektor & menggabungkan serangkaian elemen kritical (termasuk target, insentif, MRV, dll.).
Rencana Tata Ruang	◐	●	• 17 yurisdiksi memiliki rencana spasial yang sudah terlaksana; kecuali tiga diantaranya (Acre, Pará, Jalisco) gagal untuk menangani hak masyarakat lokal dan/atau adat, dan/atau memitigasi efek dari rencana pembangunan infrastruktur, dan/atau dibangun dengan partisipasi pemangku kepentingan dengan tingkat atau kualitas rendah. • Kemampuan untuk memantau & melaksanakan peraturan tata guna lahan sesuai rencana spasial adalah tantangan utama.
Target Pelaksanaan	◐	●	• 24 yurisdiksi bertenggat waktu, target kuantitatif yang terkait dengan pengurangan deforestasi dan/atau emisi dari deforestasi & degradasi (<i>lihat Bagian 2</i>). • Dua pertiga yurisdiksi memiliki tenggat waktu, target kuantitatif yang berfokus pada pertanian berkelanjutan dan isu-isu sosial (termasuk pembagian manfaat, hak, keterikatan, peningkatan penghidupan, dll.). • Mengevaluasi progres target adalah tantangan utama di kebanyakan yurisdiksi, terutama untuk target selain yang terkait dengan deforestasi dan peningkatan reforestasi.
MRV	○	◐	• Hampir semua yurisdiksi memiliki sistem MRV yang sedang dalam pengembangan atau telah terlaksana, tapi masih kurang di satu area berikut – frekuensi, keandalan, akurasi atau transparansi. • 12 yurisdiksi telah memiliki sistem yang maju – baik khusus untuk yurisdiksi atau sebagai bagian dari sistem nasional – tetapi gagal untuk menyediakan laporan dan data mereka ke publik.
Kebijakan & Insentif	◐	◐	• Tantangan utama yurisdiksi adalah kurang selarasnya kebijakan antar tingkat pemerintahan dan/atau beragam sektor; sementara kebanyakan yurisdiksi memiliki beberapa kebijakan untuk melaksanakan LED-R, mereka cenderung terisolasi dan/atau dengan ruang lingkup sempit di kurang lebih separuh yurisdiksi. • Tantangan besar dari pengembangan kebijakan dan insentif yang berdaya tahan diantaranya pergantian politik, pembatasan berkaitan dengan struktur pemerintah nasional yang terpusat dan korupsi di tingkat subnasional & nasional.
Tata Kelola Pemangku Kepentingan	◐	●	• Saat ini atau tengah berlangsung proses multi pemangku kepentingan yang relevan dengan LED-R di 20 yurisdiksi, tapi ada beberapa (Acre, Jalisco, Quintana Roo) yang telah memiliki perwakilan, lembaga multi pemangku kepentingan khusus untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana dan kegiatan LED-R. • Tantangan umum yang muncul adalah tidak memadainya inklusi kelompok pelaku penting terkait diskusi koordinasi dengan sektor publik (contoh: produsen, IP, LC).
Pertanian Berkelanjutan	○	◐	• 14 yurisdiksi telah membuat progres di produksi pertanian berkelanjutan pada beberapa bagian yurisdiksi atau sejumlah rantai pasokan • Hanya Mato Grosso yang memiliki inisiatif lebih lanjut yang ditujukan bagi perkebunan dan produksi ternak skala besar dan kecil. • Kebanyakan yurisdiksi tidak memiliki insentif cukup atau memadai untuk produksi berkelanjutan (termasuk akses pasar rendah), seiring dengan rendahnya keterlibatan sektor swasta di agenda yurisdiksi berkelanjutan.
Masyarakat adat (IP) & Komunitas Lokal (LC)	◐	●	• Di 18 yurisdiksi, tenurial lahan dan hak akses bagi IP & LC lemah atau kurang ditegakkan dan/atau rendahnya keterlibatan IP. • Mekanisme untuk menjamin hak lahan & memastikan pembagian manfaat yang seadil mungkin paling tepat diterapkan di Acre & Quintana Roo, sedang diupayakan juga di yurisdiksi lainnya (contoh: Mato Grosso, yurisdiksi Meksiko lainnya & Papua Barat, diantaranya).
Pembiayaan LED-R	○	◐	• Lambannya pembiayaan yang diterima kebanyakan yurisdiksi, membuatnya menjadi satu dari elemen terlemah dalam progres yurisdiksi berkelanjutan. • 23 dari 33 yurisdiksi tidak memiliki atau hanya sedikit dana untuk mendukung pembangunan program & strategi LED-R, sementara sisanya memiliki (tapi tak cukup banyak) untuk membiayai usaha mereka. (<i>lihat Bagian 4</i>)

4. PEMBIAYAAN IKLIM & KEMITRAAN

Kebanyakan yurisdiksi yang dipelajari (35) adalah penanda tangan Deklarasi Rio Branco, yang menyatakan bahwa tujuan dari mengurangi deforestasi hingga 80% di tahun 2020 hanya akan terwujud dengan bantuan eksternal, jelasnya, finansial yang memadai dan cukup serta kemitraan dengan perusahaan:

“Usaha kami untuk membentuk strategi dan program yurisdiksi bagi pembangunan rendah emisi tak dapat dilanjutkan tanpa tambahan bantuan. Kami mengajak komunitas internasional untuk bekerja sama dengan kami meneruskan membangun program yurisdiksi berskala besar yang kuat, mengintegrasikan transisi untuk pembangunan berkelanjutan ... sangatlah penting bagi kami untuk memiliki akses dukungan finansial dan teknis, dan lebih penting lagi untuk domestik dan internasional, kesempatan pasar dan nonpasar bagi pencapaian pengurangan emisi di yurisdiksi kami. . .

Kami mengajak Forum Consumer Goods dan sektor swasta lainnya yang berinisiatif mencapai rantai pasokan nol deforestasi untuk bekerja sama dengan kami membangun program yurisdiksi yang kuat bagi REDD+ dan pembangunan daerah pedesaan rendah emisi sebagai sumber daya preferensi komoditas pertanian...

Kami berkomitmen untuk mengurangi emisi secara signifikan bila pembiayaan yang memadai, mencukupi dan berdasarkan performa jangka panjang tersedia, baik melalui sumber pasar maupun nonpasar. Apabila jaminan untuk pembiayaan seperti ini dibuat, kami berkomitmen untuk mengurangi deforestasi hingga 80% di tahun 2020” (Deklarasi Rio Branco, 2014)

Dalam bagian ini, kami mengkaji berapa banyak bantuan eksternal yang telah diterima yurisdiksi melalui pembiayaan dan kemitraan iklim dengan perusahaan yang mencari komoditas produksi berkelanjutan. Gbr. 9 memberikan ringkasan visual progres yang dibuat hingga saat ini dalam pembiayaan 39 yurisdiksi dan dalam menciptakan kemitraan pemerintah-perusahaan untuk mendorong kemajuannya.

PEMBIAYAAN IKLIM

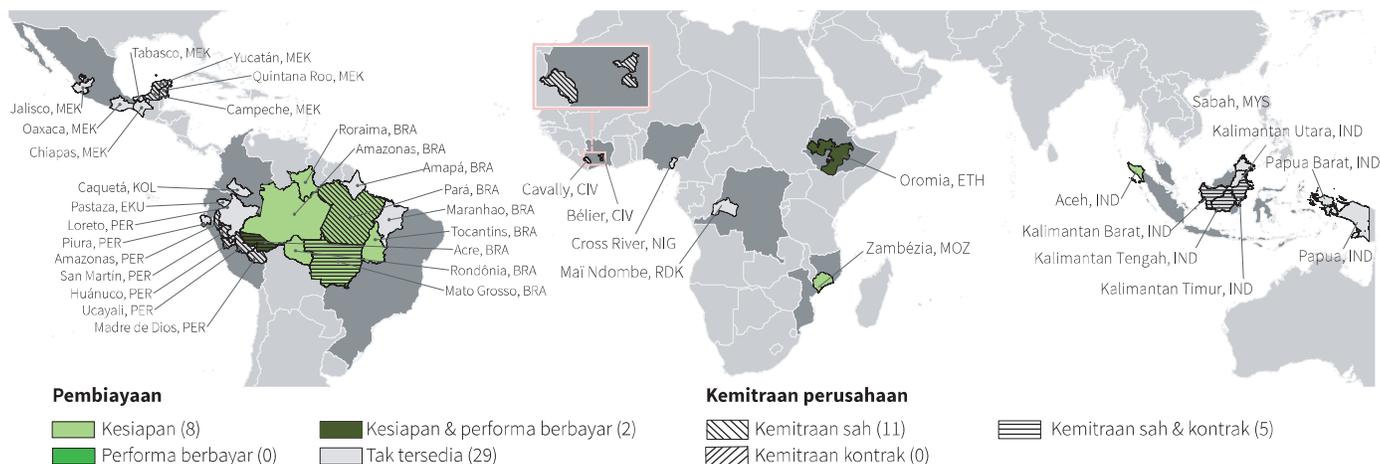
Dalam sintesis terkini, “Why Forests? Why Now?”²⁶ Seymour dan Busch mendeskripsikan keadaan terkini dari pembiayaan iklim hutan tropis “terlalu rendah, terlalu lambat, terlalu terbatas sebagai bantuan”. Studi ini mendukung temuan umum tersebut.

Performa berbayar

Kami telah mengklasifikasikan finansial dalam dua kategori umum: dengan dan tanpa persyaratan performa. Dalam “performa berbayar” (PFP) atau pembiayaan “berbasis performa”, pemberi dana atau investor berkomitmen untuk membayar pemerintah subnasional atau nasional jika hambatan keterikatan waktu untuk mengurangi deforestasi atau emisi karbon dari deforestasi telah tercapai. Tipe pengaturan finansial seperti ini adalah ciri khas “era REDD+”, dilakukan oleh Norwegia, Jerman dan baru-baru saja Britania Raya. Kebanyakan pembiayaan PFP telah dialokasikan pada pemerintah nasional, mulai dari janji Norwegia senilai AS\$1 miliar kepada Brazilian Amazon Fund. Jerman telah memelopori kesepakatan PFP sub-nasional melalui program “REDD Early Movers”.

Pembiayaan berbasis performa untuk yurisdiksi yang masih berjuang tidaklah memadai atau cukup, tapi ini mencapai yurisdiksi dan hasil awalnya sangat positif. Satu-satunya subnasional yang berpengalaman dengan mekanisme ini (Acre, Brasil²⁷) menunjukkan bahwa kontrak PFP yang dibuat dengan baik dapat mendorong kemajuan bagi LED-R (*lihat Bagian 3*).

Kontrak performa berbayar baru telah ditanda tangani dengan Mato Grosso, Brasil (Jerman KfW/REM, Britania Raya), Kolombia (“Amazon Vision”, Jerman, Norwegia, Britania Raya) dan Ekuador (Jerman, Green Climate Fund dan Global Environmental Facility). Dana PFP yang akan mengalir ke Caquetá dan Pastaza, belum dipastikan.



Gambar 9: Pembiayaan dan Kemitraan perusahaan-pemerintah. Peta dari yurisdiksi yang diteliti menunjukkan mereka yang telah menerima pembiayaan iklim atau kontrak performa berbayar dan mereka yang telah membuat kemitraan formal secara “sah” atau “kontrak” dengan perusahaan yang fokus kepada penyediaan komoditas yang berkelanjutan.

26 Seymour, F. dan J. Busch. 2016. Why Forests? Why now? The Science, Economics, and Politics of Tropical Forests and Climate Change. Center for Global Development.
 27 Lihat M. Leal, dkk. “Acre, Brazil”: https://earthinnovation.org/wp-content/uploads/2018/09/profiles_led/SJS_Profiles_ENG/Brazil/Profile_ACRE_Leal_2018_ENG.pdf.

Sistem performa berbayar terbesar di dunia untuk hutan tropis – Brazilian Amazon Fund, diatur oleh Bank Pembangunan Brasil (BNDES) dan dibiayai sebagian besar oleh Norwegia – telah menyerahkan hibah yang besar kepada enam yurisdiksi GCF di Brasil, yang pada umumnya telah mengimplementasikan hukum dan peraturan lingkungan. Aliran dana ke Amazon Fund adalah berbasis performa berskala seluruh wilayah Amazon, Brasil, dan kontrak di negara bagian Brasil tidak dikondisikan dengan tren deforestasi di area penerima.

Pembiayaan iklim lainnya

Selain performa berbayar, kami juga mengidentifikasi pembayaran untuk kesiapan REDD+ di 24 yurisdiksi yang dipelajari. Investasi ini mendukung perencanaan dan koordinasi strategi dan rencana; pembangunan kapasitas dan penguatan institusi; pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan perundangan; perbaikan pemantauan, pelaporan dan verifikasi (MRV); menyiapkan sistem untuk pembagian manfaat; mengembangkan mekanisme finansial; dan meluncurkan inisiatif percontohan dan uji coba.

Dua dari yurisdiksi yang dipelajari (Acre dan Tocantins) mampu mengamankan pinjaman untuk mendukung pelaksanaan strategi pembangunan berkelanjutan subnasional. Investasi macam ini bisa meluas, dan memengaruhi beragam sektor di yurisdiksi ekonomi, termasuk pertanian, kehutanan, infrastruktur dan lainnya yang relevan dengan pembangunan sosio-ekonomi di tiap wilayah spesifik.

Mulai tahun 2016, 29 dari 39 yurisdiksi yang dipelajari telah menerima – atau dijadwalkan menerima – kurang lebih AS\$2,3 miliar secara kolektif. Kebanyakan dari pembiayaan ini (88%) tak diikuti “persyaratan” pengurangan deforestasi. Semua kecuali 6 dari 29 yurisdiksi telah menerima atau dijadwalkan menerima, setidaknya AS\$10juta dalam pembiayaan iklim tipe ini. Pembiayaan iklim yang bukan berdasar performa sampai ke kebanyakan (82%) yurisdiksi melalui pemerintah nasional.

Saat laporan ini sampai di pers, ~30 dari yurisdiksi Satuan Tugas GCF akan diberi imbalan masing-masing sebesar \$300-400ribu dari pendanaan Norwegia melalui UNDP untuk membangun atau memperbaiki strategi yurisdiksi. Pendanaan ini harusnya mengarah pada progres penting dalam strategi yang semestinya membuat lebih cerah kemitraan mereka di masa mendatang.

KEMITRAAN PERUSAHAAN-PEMERINTAH UNTUK KOMODITAS BERKELANJUTAN

“*Kemitraan yang sah*” adalah mereka yang telah dengan resmi berkoalisi, berdeklarasi, atau struktur tata kelola yurisdiksional, tapi masih belum menghasilkan sumber preferensial resmi, investasi finansial, atau bantuan teknis untuk yurisdiksi. Hampir separuh (16) dari yurisdiksi yang ada telah membuat kemitraan “sah”, baik melalui strategi yurisdiksi individual (contoh: Mato Grosso PCI, Pará, Acre, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah) maupun konsorsium yang melibatkan beberapa yurisdiksi (lima pemerintahan regional Peru melalui

“Koalisi untuk kemitraan LED-R Publik-Swasta; Kesepakatan Kerangka Kerja Peninsula Yucatan Berkelanjutan (ASPY); dan Inisiatif Hutan Kakao di Pantai Gading). Perjanjian-perjanjian ini, secara umum, menghasilkan beberapa keuntungan untuk yurisdiksi, walaupun hal itu bisa berubah.

Kemitraan “kontrak” memiliki kesepakatan resmi yang mendeskripsikan tanggung jawab dan kontribusi setiap pihak dalam kolaborasi ini. Kemitraan “kontrak” individual telah dibentuk di Mato Grosso (contoh: Carrefour di daerah Jurueña), Acre, Unilever dengan distrik-distrik di Kalimantan Tengah, Asia Pulp and Paper di Kalimantan Barat, dan lainnya di Kalimantan Timur.

Struktur resmi untuk mendorong kemitraan perusahaan dengan yurisdiksi sedang dikembangkan melalui Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) “uji coba sertifikasi yurisdiksi” di Kalimantan Tengah dan Sabah.

APAKAH KOMITMEN YURISDIKSI BERKAITAN DENGAN JANJI PERUSAHAAN?

Sejumlah kecil (5) kemitraan kontrak dan resmi antara perusahaan dan pemerintah hutan tropis telah berjanji untuk membantu mengatasi deforestasi tropis (Gbr. 9). Angka ini mungkin masih kecil, disebabkan karena kemungkinan tingginya risiko serangan dari LSM advokasi bagi perusahaan yang ingin berganti ke strategi sumber yurisdiksional, mengarah pada pentingnya mencapai keselarasan yang lebih baik antara kampanye LSM dan pentingnya kemitraan antar yurisdiksi. Ada juga perbedaan metrik di perjanjian tersebut. Pemerintah juga dapat berjanji untuk mengurangi deforestasi di seluruh penjuru yurisdiksi, sementara perusahaan berusaha mencapai rantai pasokan nol deforestasi.

KOTAK 4. BALIKPAPAN CHALLENGE: PRODUKSI PERTANIAN DAN DEFORESTASI TROPIS

Diluncurkan pada Pertemuan Tahunan GCF tahun 2017, Balikpapan Challenge mengajak untuk mendorong progres ke tujuan utama dari Deklarasi Rio Branco: mengurangi deforestasi tropis berhubungan dengan produksi pertanian. Hal ini membutuhkan pendekatan dari bawah, mendukung strategi yurisdiksi dan koalisi regional yang muncul diantara anggota GCF dengan memanfaatkan sinergi potensial antara perjanjian rantai pasokan perusahaan, sistem sertifikasi berkelanjutan dan program yurisdiksi untuk mengurangi deforestasi.

Balickpapan Challenge telah mewujudkan Komite Pengarah Global untuk mempromosikan kerangka kerja global dengan mendorong yurisdiksi berkelanjutan ke arah “bersaing menjadi yang terbaik” antar yurisdiksi untuk mencapai nol deforestasi, dimulai dari anggota GCF. Mereka juga menyarankan strategi yurisdiksi dan regional GCF. Komite Pengarah digawangi oleh Sekretariat GCF dan Earth Innovation Institute, dan juga perwakilan²⁸ dari proses diskusi, asosiasi industri, perusahaan produsen dan retail, penyandang dana pemerintah, organisasi internasional, pemerintah yurisdiksi (mewakili anggota GCF), dan organisasi.

28 Daftar lengkap perwakilan dan penjelasan lebih detail dari Komite Pengarah dan tugasnya tersedia di <https://earthinnovation.org/2018/05/balickpapan-challenge-brings-local-governments-together-with-international-experts-to-solve-tropical-deforestation/>

Tabel 4: Perjanjian dan progres yang dibuat oleh yurisdiksi dan perusahaan yang berkomitmen memperlambat deforestasi hutan

PROGRES DAN PERJANJIAN DEFORESTASI HUTAN		
	Yurisdiksi Hutan Tropis	Perusahaan
Jumlah perjanjian	Deklarasi Rio Branco (35) Deklarasi New York tentang Hutan (20) Under2 MOU (83)	Komitmen individu (473) Forum Consumer Goods (~400) NYDF (57)
Komitmen 2020	Deklarasi Rio Branco: Pengurangan 80% di 2020 jika kemitraan perusahaan dan finansial memadai	155 (30%) dari 473 perusahaan telah membuat komitmen rantai pasokan 2020 ²⁹
Metriks deforestasi	Penurunan deforestasi regional (% pengurangan di bawah rerata historis)	Nol deforestasi di rantai pasokan
Progres deforestasi	Deforestasi menurun di 20 dari 35 yurisdiksi RBD, dan menjadi >50% di 7 diantaranya	49 dari 473 komitmen perusahaan (10%) dengan >75% kepatuhan dengan janji 2020
Progres emisi karbon	6,77 GtCO ₂ e (emisi terhindarkan) ³⁰	N/A
% areal hutan tropis global	28% Deklarasi Rio Branco	N/A
Komoditi	Semua produk dalam yurisdiksi	Kedelai, minyak sawit, daging, kayu, kertas

KOTAK 5. KEMITRAAN LOKAL KE GLOBAL: MASYARAKAT ADAT, KOMUNITAS LOKAL DAN PEMERINTAH SUBNASIONAL

Masyarakat adat, komunitas tradisional dan komunitas lain yang bergantung pada hutan adalah mitra yang penting dalam perjuangan untuk memperlambat perubahan iklim. Mereka memiliki atau telah merancang hak-hak di sekitar 18% hutan tropis dunia dan menjaga 20% dari total karbon di atas tanah yang tersimpan di wilayah hutan tropis utama (Indonesia, RD Kongo, Mesoamerika, Basin Amazon). Pemerintah subnasional telah meningkatkan pengakuan atas peran masyarakat adat dan komunitas lokal dan mewujudkan komitmen untuk melawan deforestasi.

Di 2014, anggota GCF menandatangani Deklarasi Rio Branco, dimana mereka berkomitmen untuk mengurangi deforestasi sebanyak 80% pada 2020 dan berbagi manfaat dari upaya-upaya ini dengan masyarakat adat dan komunitas lokal. Komite Global GCF dalam Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal³¹ dibentuk pada tahun 2016 dengan tujuan jangka panjang memperkuat kemitraan antara pemerintah subnasional dan masyarakat adat beserta komunitas lokal untuk membantu merubah Deklarasi Rio Branco dari perjanjian menjadi praktik. Komite Global mempromosikan kemitraan antara pemerintah, masyarakat adat, dan komunitas lokal dengan menciptakan landasan untuk dialog pada tingkat global, nasional dan regional. Selain juga melayani penginformasian dan memandu kemitraan dengan membentuk “Prinsip-prinsip Kolaborasi” dan untuk mereplikasi dan mengadaptasi model sukses lewat pertukaran pengetahuan.

Keberlanjutan Yurisdiksional dapat mendukung kemajuan terkait penjaminan hak-hak atas lahan, pengakuan politik (mengintegrasikan masyarakat adat ke dalam pengambilan keputusan), pengembangan ekonomi untuk mendukung penghidupan, pembangunan kapasitas dan pengembangan kepemimpinan untuk mendukung determinasi diri dan lembaga serta pengakuan kultural – semua ini penting untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan dan ekuitabel. Beberapa contoh apa saja yang bisa dicapai lewat tipe kemitraan seperti ini misalnya:

- Pembangunan ekonomi – Dewan Masyarakat Adat Papua Barat dan pemerintah provinsi bekerja bersama untuk menjamin hak-hak masyarakat lokal untuk mengatur hutan mereka dan menciptakan insentif untuk mengatur hutan
- Pengakuan politik – Dalam yurisdiksi seperti Acre, Quintana Roo, Mato Grosso, Papua Barat dan Kalimantan Tengah, Masyarakat adat memiliki atau mendapatkan peran sebagai pengambil keputusan yang lebih prominen dan pengakuan politik yang lebih luas
- Pembentukan kapasitas – di Acre, sebuah program pelatihan untuk petugas penyuluh masyarakat menjadi landasan dan katalisator untuk lembaga masyarakat adat dalam membentuk pembangunan berkelanjutan di dalam teritori dan komunitas mereka³²

²⁹ Stephen Donofrio dan tim “perubahan pasokan” di Forest Trends. supply-change.org

³⁰ Tidak semua penurunan ini dapat dihubungkan dengan aksi dari yuridiksi itu sendiri; banyak yang melibatkan intervensi pemerintah nasional dan lembaga swadaya.

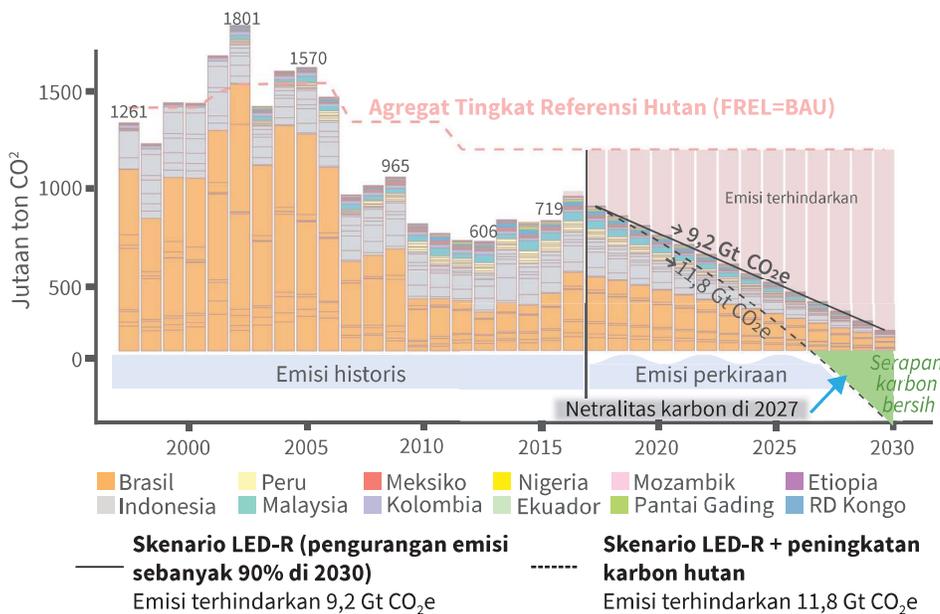
³¹ Deskripsi yang lebih detail tentang Komite Global dan tugasnya tersedia di <https://earthinnovation.org/publications/the-governors-climate-and-forests-task-force-global-committee-for-indigenous-peoples-local-communities/>

³² M. DiGiano, dkk. 2018. “The Twenty-year-old Partnership between Indigenous Peoples and the Government of Acre, Brazil”. Tersedia di <https://earthinnovation.org/publications/the-twenty-year-old-partnership-between-indigenous-peoples-and-the-government-of-acre-brazil/>

5. SEBUAH PANDANGAN MASA DEPAN: DAMPAK POTENSIAL

Untuk mengakses dampak potensial yang dapat disadari jika 39 yurisdiksi memenuhi komitmen mereka untuk mengurangi deforestasi dan mempercepat pemulihan hutan, kami menguji 3 skenario alternatif berdasar pada titik asumsi berbeda (Gbr. 10).

- **Skenario BAU (*business-as-usual*)** diproyeksikan menggunakan tren deforestasi dan periode yang direpresentasikan oleh tiap FREL. Grafik batang subdivisi menunjukkan kontribusi yurisdiksional di dalam negara. Skenario ini memproyeksikan kemungkinan emisi jika yurisdiksi mengikuti skenario BAU melanjutkan tren deforestasi historis.
- **Skenario LED-R** diproyeksikan dengan pengurangan deforestasi sebanyak 90% pada 2030 relatif terhadap FREL. Skenario ini mengimplikasikan bahwa yurisdiksi mengikuti jejak penurunan yang terakselerasi dalam deforestasi untuk mencapai 90% emisi pada 2030. Skenario ini ambisius tapi memungkinkan. Yurisdiksi Brasil telah berhasil mengurangi deforestasi sebanyak 60% dengan mengikuti FREL mereka selama hampir 5 tahun terakhir.
- **Skenario nol deforestasi** mempertimbangkan pengurangan 90% dalam deforestasi ditambah regenerasi alami atau terinduksi dari areal hutan yang terdegradasi atau ditebang berdasar perjanjian subnasional atau nasional yang dipersempit. Areal hutan yang diregenerasi mencapai 9,4 Mha di 2030. Dalam 14 tahun sesuai tahun simulasi (2017-2030) regenerasi hutan mencapai 1/5 dari stok karbon yang telah diproyeksi. Karbon meningkat secara linear dari tahun 1–14 dan total stok karbon yang meningkat sebagai fungsi dari *weighted distribution* umur hutan dan areal berhutan setiap tahun.



Gambar 10: Di bawah skenario LED-R, kami memperkirakan bahwa secara bersamaan 39 Yurisdiksi dapat menghindari total 9,2 Gt CO₂e antara 2017 dan 2030 dengan menurunkan deforestasi mereka 90% dari tingkat referensi historis emisi hutan. Selain itu, di bawah penambahan karbon, skenario “nol deforestasi” (regenerasi alami dan rangsangan manusia terhadap lahan hutan yang ditebang dan terdegradasi seimbang dengan kehilangan hutan), netralitas karbon dapat dicapai di 2027 dengan serapan karbon bersih 0,4 GtCO₂e per tahun di 2030 dan total emisi yang dihindari 11,8 Gt CO₂e.³³

³³ Emisi yang diobservasi selama periode 1990-2017 yang diambil dari data deforestasi tahunan yurisdiksi dan faktor emisi karbon dianggap tetap oleh FREL nasional yang diserahkan ke UNFCCC. Kelompok karbon yang dimasukkan adalah: biomassa di atas tanah, biomassa di bawah tanah, degradasi gambut, tanah dan sampah seperti yang telah dijelaskan di tiap FREL. Regenerasi target hutan bergantung pada perjanjian reforestasi nasional/subnasional dan nol deforestasi. Peruntukan regenerasi dari tiap yurisdiksi didistribusikan secara seragam dari tahun 2017 dan 2030.

KOTAK 6. GCFIMPACT.ORG DAN TURUNANNYA: MEMFASILITASI KEMITRAAN DENGAN YURISDIKSI HUTAN

Transisi menuju keberlanjutan yurisdiksi di wilayah hutan tropis dapat difasilitasi jika inovasi dalam kebijakan publik dan program yang memudahkan melakukan bisnis mendorong investasi baru dalam usaha keberlanjutan. Informasi dari inovasi ini tidak mudah ditemui. GCFImpact.org adalah platform daring yang dikembangkan sebagai respons akan kebutuhan ini.

GCFImpact.org saat ini menyediakan informasi tentang tren deforestasi, pencapaian pengurangan emisi karbon, produksi dari 60 produk pertanian, performa ekonomi, kebijakan publik, program dan perjanjian dan memudahkan dalam melakukan bisnis di yurisdiksi 55 hutan tropis yang berlokasi di 8 negara. Ini dibangun di atas Database GCF Knowledge, daring resmi ini mencatat informasi kritical tentang Yurisdiksi Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan.

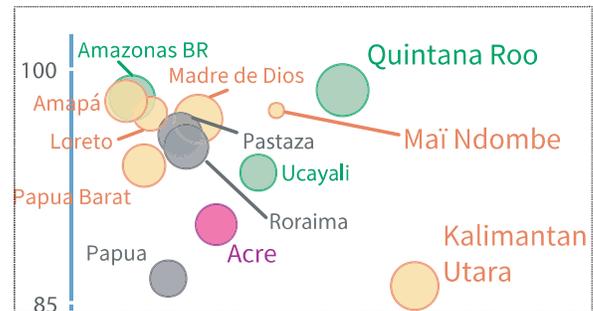
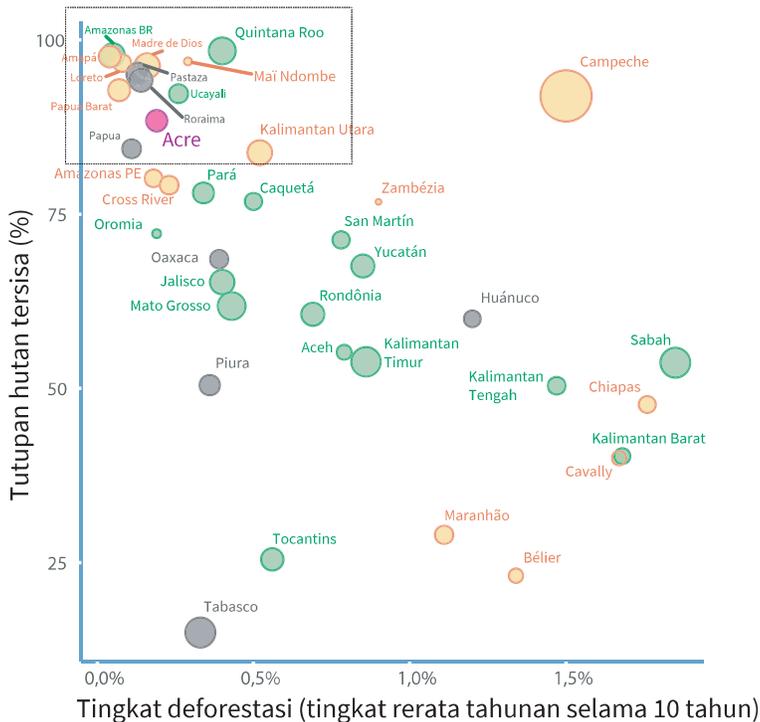
GCFImpact.org adalah satu-satunya langkah awal menuju pemfasilitasian kemitraan strategis. Beberapa yurisdiksi telah mengembangkan dirinya, dengan platform yang dibuat sendiri. Acreppp.org (untuk Acre, Brasil) dan pcmomitor.org (untuk Strategi PCI Mato Grosso) adalah 2 contoh sistem informasi yurisdiksional yang tumbuh dari dialog pemangku kepentingan, untuk memfasilitasi akses yang mudah atas perkembangan informasi terpercaya terhadap tujuan dan visi jauh di masa depan di tiap wilayah. Sistem ini juga menjadi sebuah deklarasi pernyataan minat atas kawasan tropis, komitmen yang spesifik dan perkembangan dan dibuat untuk menjaga ekosistem mereka dan mencapai pembangunan yang inklusif secara sosial. Dalam kasus di Acre, platformnya juga didesain untuk menarik investasi ke dalam industri rendah karbon mereka.



JALAN MANAKAH UNTUK YURISDIKSI MENUJU NOL DEFORESTASI?

Potensi untuk transisi skala besar ke arah nol deforestasi sangat bervariasi lintas yurisdiksi, tergantung pada imbal-balik antara pertanian dan hutan yang dihadapi di tiap wilayah, dan kesiapan mereka untuk mengimplementasikan strategi, baik itu memperlambat deforestasi maupun mempercepat pemulihan hutan. Pemulihan hutan/retorasi menjadi lebih mudah untuk dipromosikan dimana ada banyak lahan yang dibersihkan dengan produktivitas pertanian tingkat rendah.

Ketiadaan jalan yang jelas untuk menumbuhkan hasil pertanian, prospek untuk membiarkan lahan marginal menjadi hutan atau secara aktif merestorasi hutan menjadi sangat kecil. Banyak dari yurisdiksi yang dikaji telah membuat progres tingkat menengah hingga tinggi menuju LED-R dengan 60-90% hutan alami mereka yang tersisa (Gbr. 11) dan dapat menjadi kandidat kuat untuk merealisasikan nol deforestasi dalam waktu yang relatif dekat.



Belum dinilai
 Awal
 Menengah
 Lanjut

30 PDB per kapita
 10 Ribuan USD di 2015
 2

Gambar 11: Yurisdiksi diposisikan berdasarkan tutupan hutan yang ada (sebagai persentase areal hutan alami) dan rerata tahunan deforestasi (rerata selama 10 tahun terakhir). Ukuran lingkaran mengindikasikan PDB per kapita di tiap yurisdiksi. Sebagai tambahan, tiap tingkat (rerata) perkembangan keseluruhan yurisdiksi diindikasikan.

TANTANGAN & PELUANG

Yurisdiksi subnasional menghadapi penghalang yang sangat bervariasi untuk meningkatkan strategi pengembangan rendah emisi. Di saat yang sama, ada peluang penting untuk meningkatkan keberlanjutan

yurisdiksi meski ada penghalang. Di bawah ini, kami merangkum beberapa dari tantangan-tantangan yang paling umum dan peluang yang diidentifikasi lintas 33 yurisdiksi yang disurvei.

TANTANGAN

- Administratif dan legal otonomi dari pemerintah subnasional sangat bervariasi dari satu negara dengan negara lain dan terkadang cukup dangkal di beberapa negara
- Terdapat ketegangan kekuasaan yang sudah cukup lama dan kompleks terhadap sektor wilayah dengan prioritas konflik
- Kapasitas teknik yang rendah dan pembiayaan yang tidak memadai menghambat implementasi meski rencana aksi yurisdiksi telah lengkap
- Isu kompleks terkait hak tenurial lahan adat masih kerap belum terpecahkan meskipun kemitraan penting telah ada antara pemerintah dan IP/LC
- Belum memadainya keselarasan dari aktivitas sektor swasta dengan hasil agenda kebijakan yang relevan menyebabkan tertinggalnya peluang untuk memperkuat tata kelola secara lebih luas
- Tidak mencukupinya insentif (termasuk akses pasar yang terbatas) untuk komoditi yang memproduksi keberlanjutan yang tersedia, sebagian karena rantai nilainya belum dikembangkan.

PELUANG

- Banyak yurisdiksi subnasional memiliki kapasitas signifikan untuk diuji, beradaptasi dan mengimplementasikan kebijakan dan program yang dapat diadaptasikan oleh pemerintah nasional atau direplikasi di wilayah lain.
- Banyak dari yurisdiksi yang disurvei telah mengembangkan kerangka kerja institusional untuk mengintegrasikan strategi LED-R untuk mengatasi perjuangan kekuatan historis
- Lebih banyak dan bervariasinya kanal media/publisitas yang membuat yurisdiksi mampu untuk menunjukkan perkembangan dan inisiatifnya agar dikenal oleh donor dan investor potensial
- Bahkan sejumlah kecil pembiayaan baru dapat menyuntikkan kehidupan ke dalam proses yang tengah berjalan dan menyediakan dukungan untuk menguji kebijakan inovatif dan insentif
- Inisiatif percontohan lokal dan di dalam kota menunjukkan potensi semakin membesar ke arah aksi yurisdiksi yang lebih luas

-
- 23 yurisdiksi dalam studi telah atau akan melakukan pemilihan di tahun ini. Pemilihan dapat menampilkan baik itu tantangan maupun peluang, bergantung pada isi tiap yurisdiksi dan prioritas politis serta kapasitas administrasi yang ada.
-

TEMUAN UTAMA

- 39 Yurisdiksi yang dikaji mencakup 28% hutan tropis dunia dan didistribusikan lintas cakupan yang luas baik untuk tingkat deforestasi dan pecahan hutan alami yang masih tersisa
- Hampir semua (38 dari 39) yurisdiksi telah membuat komitmen formal untuk memperlambat deforestasi dan/atau mengakselerasikan reforestasi/pemulihan hutan
- Banyak yang membiayai dan mengimplementasikan kebijakan dan program inovatif, termasuk insentif dan memprioritaskan masyarakat adat, komunitas lokal dan petani penggarap sebagai penerima manfaat kunci dari intervensi ini
- Deforestasi telah menurun di separuh yurisdiksi (19 dari 39) di bawah proyeksi resmi dalam tingkat referensi hutan subnasional
- Penurunan dalam deforestasi ini menunjukkan sekitar 6,77 GtCO₂e dari emisi karbon terhindarkan, yang ditujukan bagi intervensi kebijakan nasional dan subnasional dan aksi sektor swasta
- Mempertimbangkan 9 elemen inti dari strategi pembangunan rendah emisi yang berhasil di lintas 33 yurisdiksi, satu yurisdiksi dalam posisi tingkat “Lanjut”, 16 berada di tingkat “Menengah” dan 15 berada di tingkat “Awal”; semua yurisdiksi ini mendapatkan dukungan dan pengakuan
- Elemen yang paling maju lintas yurisdiksi adalah pembangunan rencana tata ruang dan platform tata kelola multi pemangku kepentingan, dengan progres yang sedikit dalam pengembangan sistem MRV yang tangguh, transparan, dan aksesibel, membangun kebijakan yang penting, dukungan teknik dan keuangan untuk transisi ke arah pertanian berkelanjutan dan mengamankan kebutuhan pembiayaan untuk strategi pembangunan rendah emisi
- Meski hampir separuh (14 dari 33) yurisdiksi telah menunjukkan kemajuan yang berhubungan dengan produksi pertanian yang berkelanjutan, yang mengejutkan adalah beberapa diantaranya (5) telah memasuki komoditas formal bersumber pada kesepakatan dengan perusahaan yang secara langsung berkontribusi lewat pembiayaan, bantuan teknis, atau cara lain; lebih umum (16 dari 39) telah memiliki kemitraan “sah” lewat konsorsium multi sektor dan dialog
- Standar saat ini dan sistem peringkat untuk yurisdiksi secara umum membangun tingginya garis penunjuk dari performa yurisdiksi yang dapat meninggalkan yurisdiksi dengan tingkat kapasitas tata kelola yang rendah tanpa membutuhkan mitra; sebuah pendekatan yang lebih fleksibel untuk membangun kredibilitas juga diperlukan
- 58% (23 dari 39) yurisdiksi telah menerima lebih dari AS\$10M dalam pembiayaan iklim, namun kebanyakan dari pendanaan ini datang tanpa hubungan formal atas performa dalam pengurangan emisi; satu yurisdiksi telah menerima pembiayaan berbasis performa langsung dan tiga lainnya berada dalam antrian
- Jika target nol deforestasi untuk 2030 diadopsi ke dalam semua yurisdiksi yang diteliti, mengintegrasikan target untuk memperlambat deforestasi dengan pemulihan dan mengembalikan hutan alami di lahan yang telah dibuka, sekitar 12 GtCO₂e akan terhindarkan di 2030
- Yurisdiksi nol deforestasi sepertinya menjadi skenario paling memungkinkan untuk mencapai target NYDF 2030 untuk mengakhiri deforestasi tropikal.

REKOMENDASI

Tantangan kritis untuk komunitas global adalah penciptaan kondisi yang memungkinkan yang akan mendorong yurisdiksi subnasional untuk maju sebanyak dan secepat mungkin meski adanya penghalang substantial yang berhubungan dengan magnitudo sosio-ekonomi dan perubahan politik yang dibutuhkan untuk rencana perubahan. Di bawah ini kami menyediakan serangkaian rekomendasi singkat:

- Membangun langkah-langkah pemungkin secara global untuk mendorong kemitraan pemerintah-perusahaan yang lebih banyak
 - » Sebuah kerangka kerja global yang simpel untuk mendaftarkan, mengenali, dan menghubungkan cita-cita yurisdiksi ke kemitraan sektor swasta yang potensial yang dapat membantu menghindari masalah yang dihadapi dalam sertifikasi komoditas, di mana hanya produsen/pabrik yang performanya bagus yang disertifikasi
 - » Menyesuaikan kampanye strategis advokasi lingkungan demi mendukung kemitraan pemerintah-swasta yang menguntungkan
 - » Mendorong kemitraan yang menampilkan prioritas pemerintah wilayah produsen seperti yang digambarkan dalam draf Kerangka Kerja Yurisdiksi Balikpapan
- Mendukung yurisdiksi hutan tropis untuk mengatasi penghalang fundamental dalam perusahaan dan investasi berkelanjutan
 - » Meningkatkan kemudahan melakukan bisnis dan mengurangi risiko investor dengan merampingkan proses peraturan, meningkatkan kejelasan peraturan, meningkatkan transparansi, berinvestasi dalam infrastruktur hijau – sebuah usaha jangka panjang
- Meletakkan emisi terhindarkan yang terverifikasi ke lapangan
 - » Memobilisasi pengurangan emisi yang terverifikasi baik itu yang telah ada maupun yang direncanakan, untuk menciptakan peluang bisnis baru: komoditas dan produk karbon netral; dana hijau; dana tenurial lahan; fasilitas asisten teknik
- Pengenalan “Arus utama” manusia dan hak lahan lewat pendekatan yurisdiksi ke arah konsultasi dan pembagian manfaat
 - » Pengaruh persyaratan “jaring pengaman” pembiayaan iklim untuk menggiring konsultasi dan mekanisme pembagian manfaat yang lebih baik
 - » Mendukung pemerintah-IP/kemitraan masyarakat, membangun contoh seperti di Acre dan prinsip-prinsip Satuan Tugas GCF

Kutipan | Stickler, CM, AE Duchelle, JP Ardila, DC Nepstad, OR David, C Chan, JG Rojas, R Vargas, TP Bezerra, L Pritchard, J Simmonds, JC Durbin, G Simonet, S Peteru, M Komalasari, ML DiGiano, MW Warren. 2018. Keadaan Yurisdiksi Berkelanjutan. San Francisco, USA: Earth Innovation Institute/Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research/ Boulder, AS: Governors’ Climate & Forests Task Force Secretariat. <https://earthinnovation.org/state-of-jurisdictional-sustainability/>

KESIMPULAN

Sepuluh tahun setelah pembentukan Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan, sebuah media berbagi yang besar dan mengejutkan dari hutan tropis dunia mendapat tempat di tatanan geografis politik – negara, provinsi, pemerintah regional dan departemen – yang menjadikannya kemajuan yang sebenarnya dalam membangun strategi, kebijakan publik dan program-program untuk mencapai pembangunan pedesaan rendah emisi. Kemajuan ini luar biasa mengingat mekanisme penting ini berjalan untuk mengenali, membiayai, dan menghargai kemajuan ini. Langkahnya diatur untuk meningkatkan skala yang dihasilkan dalam memperlambat deforestasi dan degradasi hutan sebagai akselerasi pemulihan dan restorasi hutan. Pengakuan dan perlindungan hak hutan, dukungan yang memadai untuk penghidupan dan partisipasi dalam proses perencanaan dari masyarakat adat dan komunitas hutan lain menjadi dimensi integral dari hasil ini.

Demi keberhasilan yurisdiksi yang dikaji ini dan agar pengalaman mereka ditirukan di yurisdiksi lain, usaha penyetaraan jangka pendek akan menjadi penting. Bagi kemitraan pemerintah-perusahaan untuk mengembangkan, advokasi lingkungan harus muncul untuk mengenali dan bermanfaat bagi kemitraan ini. Pemerintah membutuhkan bantuan dan saran untuk membuat yurisdiksi mereka “bankable” dan menjadikan tempat yang makin menarik untuk berbisnis, membuat jalur untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan iklim internasional. Yurisdiksi dapat melakukan tekanan pada pemerintah nasional mereka dan proses internasional untuk mengizinkan pemanfaatan kreatif dalam pengurangan emisi terverifikasi – dimana volumenya harus meningkat pesat – untuk memaksimalkan penggunaannya dalam mendorong transisi regional ke pembangunan pedesaan rendah emisi.

